



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## TAHUN ANGGARAN 2024



 Info BNNP Kalteng

 infobnn\_prov\_kalteng

 BNN Provinsi Kalteng

 infobnnpkalteng

 infobnnpkalteng

 kalteng.bnn.go.id



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai target waktu yang ditentukan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja yang berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) pada tahun anggaran 2024 telah melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang P4GN berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BNN Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-2024 sebagai pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program P4GN.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan BNN Provinsi Kalimantan Tengah selama satu tahun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam menyelenggarakan tugas P4GN di daerah. Pelaporan ini dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mengatur, bahwa penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah dalam tahun 2024 yang meliputi kinerja Bidang di lingkungan BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan **13 Sasaran Kegiatan dan 18 Indikator Kinerja**. Pengukuran capaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh bidang, secara umum berbagai target dapat berhasil dicapai dengan cukup baik. Untuk pelaporan realisasi BNN Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan input data ke dalam aplikasi pelaporan realisasi kegiatan dan anggaran dengan laman [monevgar.bnn.go.id](http://monevgar.bnn.go.id). Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, kami berharap agar Laporan Kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan media evaluasi untuk menilai kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Demikian semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita semua. Amin.

**Palangka Raya, Januari 2025**

**Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah,**



**Dr. Joko Setiono, SH., SIK., M.Hum.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
BAB I .....	1
A. GAMBARAN UMUM .....	1
B. DASAR HUKUM .....	2
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI .....	3
BAB II .....	7
A. RENCANA STRATEGIS.....	7
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	8
C. PERJANJIAN KINERJA .....	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	13
A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN .....	13
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	81
BAB IV PENUTUP .....	86
LAMPIRAN .....	
DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA .....	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menetapkan kelembagaan Badan Narkotika Nasional, sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya struktur organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi diatur melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;.

Selanjutnya dalam kelembagaan BNN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019, dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Untuk implementasi Program P4GN, telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BNN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024.

Sasaran ini terbagi dalam **13 (tiga belas) sasaran kegiatan** dan terdiri dari **18 (delapan belas) Indikator Kinerja**.

**Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja** yaitu meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah Provinsi dengan **target sebanyak 2 kabupaten dan capaian 2 kabupaten**; meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah Provinsi **target sebanyak 2 kabupaten dan capaian 2 kabupaten**; meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori “mandiri” di wilayah Provinsi **target sebanyak 2 kabupaten dan capaian 2 kabupaten** dan meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan dengan dua indikator kinerja yakni jumlah kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari “bahaya”

menjadi waspada dengan **target sebanyak 1 kawasan dan capaian 1 kawasan** dan nilai keterpulihan kawasan rawan yang diintervensi sebesar **target sebesar 2,5 dan capaian 2,89**.

**Bidang Rehabilitasi memiliki 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja** yaitu meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan indikator kinerja persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami kualitas hidup dengan **target 68% dan capaian 79,5%**; meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi dengan satu indikator kinerja yakni jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan **target sebanyak 10 orang dan capaian sebanyak 10 orang**; meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba dengan dua indikator kinerja yakni jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi dengan **target sebanyak 1 lembaga dan capaian 1 lembaga** dan indikator kinerja jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional dengan **target sebanyak 6 unit dan capaian 6 unit**; dan meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba dengan indikator kinerja indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan **target indeks sebesar 3,60 dan capaian 3,70**.

**Bidang Pemberantasan memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja** yaitu meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya dengan indikator kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 dengan **target sebanyak 7 berkas perkara dan capaian 16 berkas perkara** dan meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba dengan indikator kinerja nilai tingkat keamanan, ketertiban dengan **target sebesar 100 indeks dan capaian 100 indeks** dan kesehatan tahanan dan nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba dengan **target sebesar 100 indeks dan capaian 100 indeks**.

**Bagian Umum selaku penanggungjawab manajemen organisasi memiliki 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja** yaitu : meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien dengan dua indikator kinerja yakni nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan **target sebesar 86 indeks dan capaian 99,98** dan indikator kinerja jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi

dengan **Nilai Kinerja Anggaran dengan target sebanyak 2 kabupaten/kota dan capaian 2 kabupaten/kota**; meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur dengan dua indikator kinerja yakni nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan **target sebesar 97,96 indeks dan capaian 99,95** dan indikator kinerja jumlah **BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA dengan target sebanyak 2 kabupaten/kota dan capaian 1 kabupaten/kota**; dan meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal dengan satu indikator kinerja yakni nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal dengan nilai dengan **target sebesar 85 indeks dan capaian 85**.

Pada Tahun 2023 BNN Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 13 sasaran kegiatan, dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 19 indikator sedangkan pada tahun 2024 BNN Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 13 sasaran kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 18 indikator.

Capaian target tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. 7 indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan;
2. 10 indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan;
3. 2 indikator kinerja yang tidak mencapai target yang ditetapkan.

Capaian target tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. 6 indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan;
2. 11 indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan;
3. 1 indikator kinerja yang tidak mencapai target yang ditetapkan.

Dari perbandingan di atas diketahui bahwa terdapat perbaikan dari kinerja tahun sebelumnya, jumlah indikator kinerja yang tidak mencapai target semakin berkurang sementara terdapat penambahan jumlah indikator kinerja yang melebihi target.

Dari beberapa indikator diatas, rata-rata capaian kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebesar 107,34%. Realisasi anggaran belanja BNN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebesar Rp.11.010.853.963,- (Sebelas Milyar Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga

Rupiah) atau 97,03% dari total anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp.11.347.093.000,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

# **BAB I**

## **A. GAMBARAN UMUM**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karena itu, BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Organisasi Instansi Vertikal, BNN mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam wilayah Provinsi, kabupaten dan kota. Tujuan tersebut harus dilaksanakan seimbang dengan satuan-satuan kerja yang ada dalam organisasi Badan Narkotika Nasional dengan sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi komponen rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. Dengan terbentuknya satuan kerja vertikal di daerah, diperlukan sistem pengukuran kerja yang seragam, tepat, akurat dan informatif terkait kinerja antara Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota sebagai alat kontrol pengawasan dan pengukuran kinerja.

Penyusunan LKIP berpedoman pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. LKIP dapat terwujud dengan baik diperlukan adanya keterpaduan sistem antar unit pelaksana tugas di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNN Kab./Kota). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.01/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 01 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

## **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI**

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah BNN dan bertanggungjawab kepada Kepala BNN dan dipimpin oleh seorang Kepala BNN Provinsi.

### **1. TUGAS POKOK**

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kalimantan Tengah. Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 meliputi :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
  - e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- dan

j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana dimaksud, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

## **2. FUNGSI ORGANISASI**

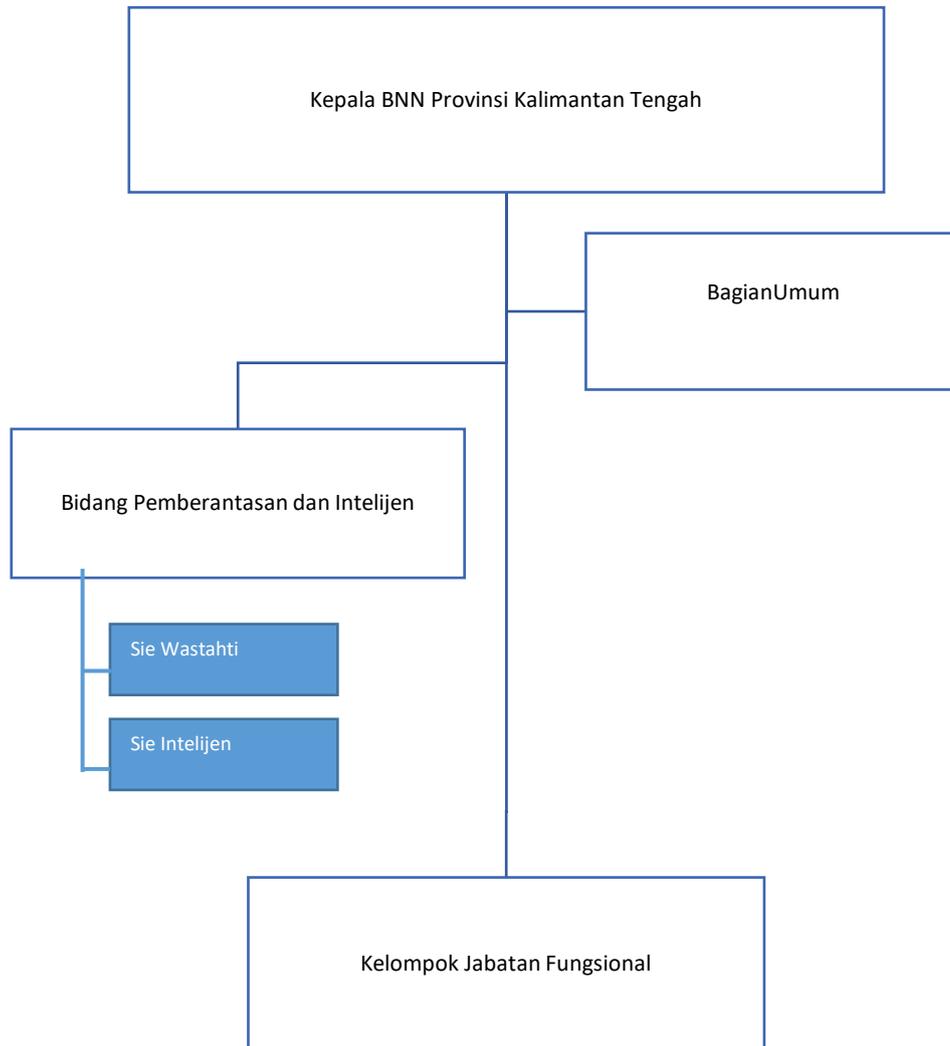
Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. pelayanan administrasi BNN Provinsi; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Provinsi.

## **3. STRUKTUR ORGANISASI**

Merujuk pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota maka struktur organisasi BNN Provinsi Kalimantan Tengah TA.2024 adalah sebagai berikut:

## Struktur Organisasi BNN Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024



Jumlah pegawai BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran saat ini 119 orang dengan rincian sebagai berikut :

NO.	SATKER	PNS	POLRI	PPNP	PPK	TOTAL
1.	BNN Provinsi Kalimantan Tengah	35	13	20	-	68
2.	BNNK Palangka Raya	12	4	14	1	31
3.	BNNK Kotawaringin Barat	7	3	12	-	22
	<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>121</b>

Sesuai DSP, kebutuhan pegawai untuk BNN Provinsi sebanyak 153 orang, namun saat ini yang terpenuhi baru sejumlah 68 orang, sehingga baru 44% yang terpenuhi dari keseluruhan yang dibutuhkan. Sedangkan kebutuhan pegawai untuk BNN

Kabupaten/Kota sesuai DSP sebanyak 74 orang, sehingga pada saat ini kebutuhan pegawai di BNN Kota Palangka Raya baru terpenuhi 41,891% dan BNN Kabupaten Kotawaringin Barat baru terpenuhi 29,729%.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian/ lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan proses teknokratik, politik, partisipatif, top down, dan bottom up, dengan pendekatan substansial yang holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS). Dokumen Renstra menjadi dasar bagi gerak strategis dan operasional BNN sebagai LPNK dalam menangani isu nasional dan sekaligus mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba.

Dalam penyusunan visi dan misi Tahun 2020-2024, BNN berpedoman atau mengacu pada visi dan misi presiden terpilih periode 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”.

Kepala BNN telah menetapkan visi BNN, yaitu: “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Dalam rangka pencapaian visi, BNN juga memperbaharui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Misi BNN yaitu:

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Profesional;
2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkoba;
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan.

Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Berikut rencana kerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan kebutuhan pendanaan untuk tahun 2024:

**Tabel Target Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan Tahun 2024**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET /VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2	Kab/ Kota	Rp.313.000.000,-
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori	2	Kab/ Kota	Rp. 328.000.000,-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET /VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
			"Tinggi" di wilayah provinsi			
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	2	Kab/ Kota	Rp.678.942.000,-
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1	Kawasan	Rp.71.600.000,-
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	2,5	Indeks	
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	Orang	Rp.56.095.000,-
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	1	Lembaga	Rp.617.238.000,-
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	6	Unit	
7	Pascarehabilitasi Penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkotika	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	3,6	Indeks	Rp.40.675.000,-
8.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang			Rp.100.000.000,-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET /VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
		ganja dan tanaman terlarang lainnya	berhasil dipetakan*)			
9.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	6	Berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	Rp. 380.000.000,-
10.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	Indeks	Rp. 167.629.000,-
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	Indeks	
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	86	Indeks	Rp.32.999.000,-
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	2	Kab/ Kota	
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	97,96	Indeks	Rp.4.457.777.000,-
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2	Kab/ Kota	
13.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	85	Indeks	Rp.48.350.000.-
14.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana					Rp.4.348.773.000,-
15.	Penyelenggaraan					Rp.40.000.000,-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET /VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
	Kehumasan dan Keprotokolan					

### C. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Perjanjian Kinerja dapat menjadi instrument dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

#### 1. Variabel

Variabel PK Satuan Kerja Vertikal terdiri atas sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target kinerja.

- a. **Sasaran kegiatan** satuan kerja vertikal diadopsi dari sasaran program unit organisasi eselon I yang memiliki fungsi di wilayah karena satuan kerja vertikal merupakan miniatur program dalam lingkup lokal.
- b. **Indikator kinerja kegiatan** adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan. Sebagaimana sasaran kegiatan satuan kerja vertikal, indikator kinerja kegiatan satuan kerja vertikal juga diadopsi dari indikator kinerja program unit organisasi eselon I. Pada level bidang di BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, indikator kinerja kegiatan merupakan turunan (derivatif) dari indikator kinerja Unit Kerja Eselon II di pusat yang relevan dengan bidang kerja masing-masing.
- c. **Target kinerja** menunjukkan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan. Target kinerja BNN Provinsi merupakan turunan (derivatif) dari target kinerja Unit Organisasi Eselon I, sedangkan target kinerja BNN Kabupaten/Kota merupakan turunan (derivatif) dari target kinerja BNN Provinsi. Target kinerja menunjukkan tingkat pencapaian indikator kinerja

sasaran kegiatan. Target kinerja satuan kerja vertikal menggambarkan pencapaian kinerja di lingkup wilayah pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Pada level bidang di BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, target kinerja merupakan turunan (derivatif) dari target kinerja pada Unit Kerja Eselon II di pusat yang relevan dengan bidang kerja masing-masing.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN**

Penetapan Kinerja BNN Provinsi Kalteng tahun 2024 menetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Kegiatan, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebanyak 18 (delapan belas) indikator. Di samping itu BNN Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian sasaran kegiatan tahun 2024, serta penjelasan hasil capaian 18 (delapan belas) Indikator Kinerja, yang diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	100%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase
1	2	3	4	5	6
	penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi			
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah Provinsi	2 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota	100%
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan	100 %
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,5	2,89	115,6%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase
1	2	3	4	5	6
6	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami kualitas hidup.	68 %	79,5%	116,91%
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100%
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional.	6 Unit	6 Unit	100%
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika.	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada	3,60 Indeks	3,70 Indeks	102,77%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase
1	2	3	4	5	6
		fasilitas rehabilitasi BNN.			
11	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana yang P-21	7 Berkas Perkara	16 Berkas Perkara	228,57%
12	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	100	100%
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks	100	100%
14	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	86 Indeks	99,98 Indeks	116,25%
15	Meningkatnya proses manajemen	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah	2 BNN Kabupaten/ Kota	2 BNN Kabupaten/ Kota	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase
1	2	3	4	5	6
	kinerja secara efektif dan efisien	Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target			
16	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97,96 Indeks	99,95 Indeks	102,03%
17	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2 BNN Kabupaten/ Kota	1 BNN Kabupaten/ Kota	50%
18	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	85 Indeks	85 Indeks	100%

Untuk mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu tahun 2024, dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2024 berkurang 1 (satu) indikator dibandingkan tahun 2023.

## EVALUASI DAN PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan capaian kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, diuraikan evaluasi dan analisa capaian kinerja sasaran dan indikator kinerja sesuai bidang tugas program P4GN dengan uraian sebagai berikut :

### **1. Sasaran : Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika**

Dalam upaya menanggulangi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, BNN sebagai *focal point* penanggulangan narkoba telah melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba secara massive. Adapun target yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah upaya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari 1,86 (2020) menjadi 1,69 (2024) atau sebesar 0,034% setiap tahun.

Untuk mencapai sasaran di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	2 kabupaten /kota	2 kabupaten /kota	100%

#### 1. Definisi Operasional

Definisi Operasional Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba.

#### 2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (Anti Drug

Scale) yang mencakup 3 dimensi yaitu *Self Regulation* yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri. Dimensi *Assertiveness* didefinisikan sebagai kemampuan mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan/tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Dimensi *Reaching Out* didefinisikan sebagai kemampuan meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain. Pengukuran Indeks Ketahanan diri remaja diukur menggunakan Aplikasi Dektari Aja untuk tahun 2020-2024. Survey ini dilaksanakan saat melaksanakan kegiatan penyuluhan tatap muka baik DIPA maupun Non DIPA melalui input online. Hasil pengisian kuesioner nantinya akan dijadikan dasar perhitungan indeks ketahanan diri Remaja.

### 3. Hasil pengukuran

Hingga triwulan IV untuk seluruh satker di BNN Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 100% dengan 2 BNN Kabupaten/Kota tercapai targetnya berkategori Sangat Tinggi, dengan rincian target capaian sebagai berikut.

NO.	SATKER	TARGET	CAPAIAN	KATEGORI
1	BNN Provinsi Kalimantan Tengah	53,51	54,16	Sangat Tinggi
2	BNN Kota Palangka Raya	53,51	55,76	Sangat Tinggi
3	BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	53,51	55,08	Sangat Tinggi
<b>DEKTARI PROVINSI KALTENG</b>			<b>55,00</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Pada tahun 2024 ini, indikator kinerja jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Sangat Tinggi" di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 2 kabupaten/kota yaitu BNNK Kotawaringin Barat dan BNNK Palangka Raya serta BNN Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini melebihi target nasional dengan jumlah indeks rata-rata 55,00 dengan capaian jumlah responden 100%.

### 4. Perbandingan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir

Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir:

Satker	2021		2022		2023		2024	
	Targ et	Realisa sasi	Tar get	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si
BNN Provinsi Kalimantan Tengah	51	49,51	52	55,24	53	51,31	53.51	54,16
BNNK Palangka Raya	51	49,12	52	53,23	53	55,75	53.51	55,76
BNNK Kotawaringi n Barat	51	55,51	52	57,15	53	54,13	53.51	55,08

Pada tahun 2020, kegiatan Informasi dan Edukasi memiliki indikator kinerja yang berbeda dengan tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 yakni persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN Narkoba. Perbedaan indikator ini mengakibatkan capaian kinerja 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024.

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	-	-	-
2021	2 kab/ kota	1 kab/ kota	50%
2022	2 kab/ kota	2 kab/ kota	100%
2023	2 kab/ kota	2 kab/ kota	100%
2024	2 kab/ kota	2 kab/ kota	100%

Untuk capaian tahun anggaran 2024, secara persentase, maka capaian kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran adalah sebesar 100%. Semua BNN Kabupaten/Kota berhasil mencapai target pada tahun 2024.

5. Permasalahan/Hambatan yang dihadapi

Satker tidak bisa mengontrol pengisian Kuesioner Dektari oleh peserta, dikarenakan kegiatan penyuluhan ada yang dilakukan dengan metode virtual.

6. Faktor yang menunjang

Pemahaman anak dan remaja dalam kegiatan penyuluhan.

7. Sebagai Rekomendasi Perbaikan ke depan

- a. Meningkatkan informasi dan edukasi kepada sasaran anak dan remaja dalam rangka meningkatkan daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba.

b. Melakukan koordinasi intensif dengan Pembina Fungsi PIC wilayah terkait survey Ketahanan Diri Remaja Tahun 2025.

8. Upaya yang telah dilakukan

a. Melakukan pendampingan kepada Peserta dalam pengisian kuesioner sehingga kuesioner diisi sesuai tata cara yang berlaku.

b. Memastikan peserta mengisi kuesioner di tempat dengan sinyal yang memadai sehingga proses pengisian berjalan lancar.

9. Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target nasional

Capaian penghitungan dektari secara nasional tahun 2024 adalah 52,04 (Tinggi) dengan target 53,51 (Tinggi), dengan klasifikasi hasil capaian wilayah:

Kategori Sangat Tinggi ( $\geq 53,71$ ) sebanyak 104 Satker

Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 54 Satker

Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 23 Satker

Kategori Sangat Rendah ( $\leq 45,97$ ) sebanyak 26 Satker

Nilai Dektari Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran mencapai lebih dari 54, yakni kategori sangat tinggi. Artinya capaian Dektari Provinsi Kalimantan Tengah melebihi target nasional BNN RI. (Sumber: Surat Plt.Deputi Pencegahan Nomor B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 24 Desember 2024 Perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Tahun 2024).





*Kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Softskill*



*Kegiatan Pelatihan Pengembangan Softskill*

**2. Sasaran : Meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba**

Untuk mencapai sasaran diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase
2	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi di wilayah Provinsi.	2 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota	100%

### 1. Definisi Operasional

Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

### 2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran di 2 BNN Kabupaten/Kota yaitu dengan menggunakan kuesioner ketahanan keluarga yang dilaksanakan secara sampling dengan instrumen ukur ketahanan keluarga yang mencakup 3 dimensi yaitu Sistem keyakinan (*belief system*), Proses Organisasi (*Organizational Process*), dan Proses Komunikasi (*Communication/Problem-solving processes*).

Tahapan Pengukuran yang dilakukan mulai dari intervensi hingga pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan target sasaran, dimana target yang dimaksud adalah desa/kelurahan
  - b. Pemilihan keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua
  - c. Pemilihan 10 (sepuluh) responden keluarga
  - d. Responden keluarga yang terpilih akan mengisi kuesioner di kertas
  - e. Fasilitator akan menyalin jawaban responden ke link kuesioner yang telah dibagikan
  - f. Nilai hasil pengukuran akan terakumulasi di BNN Pusat
3. Hasil pengukuran indikator hingga triwulan IV seluruh satker di BNN Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 100% dengan 2 BNN Kabupaten/Kota tercapai

targetnya berkategori nilai Sangat Tinggi dengan rincian sebagai berikut:

NO	SATKER	TARGET 2024	CAPAIAN	KATEGORI
1	BNN Provinsi Kalimantan Tengah	78,78	88,66	Sangat Tinggi
2	BNN Kota Palangka Raya	78,78	89,12	Sangat Tinggi
3	BNN Kab. Kotawaringin Barat	78,78	95,00	Sangat Tinggi
<b>DEKTARA PROV KALIMANTAN TENGAH</b>			<b>90,92</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Indikator kinerja Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori sangat Tinggi di wilayah Provinsi Kalteng untuk capaiannya sama dengan tahun 2023 yakni terdapat 2 Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori sangat Tinggi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2024 BNN Provinsi Kalimantan Tengah dapat mempertahankan ketercapaian target dari tahun sebelumnya.

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir

Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir :

Satker	2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
BNN Provinsi Kalimantan Tengah	78,67	86,25	78,68	83,75	78,78	78,57	78,68	88,66
BNNK Palangka Raya	78,67	82,41	78,68	79,20	78,78	93,06	78,68	89,12
BNNK Kotawaringin Barat	78,67	82,41	78,68	80,27	78,78	93,12	78,68	95,00

Pada tahun 2021, kegiatan penyelenggaran advokasi memiliki indikator kinerja berbeda dengan tahun 2022, 2023 dan 2024 yakni jumlah institusi/ lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba. perbedaan indikator ini mengakibatkan capaian kinerja 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022, 2023 dan 2024.

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2021	-	-	-
2022	2 kab/ kota	2 kab/ kota	100 %
2023	2 kab/ kota	2 kab/ kota	100 %
2024	2 kab/ kota	2 kab/ kota	100 %

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022, secara persentase, maka capaian kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah tetap yakni sebesar 100 %. Semua BNNK berhasil mencapai target pada tiga tahun berturut-turut karena BNN Provinsi Kalteng telah melakukan koordinasi yang lebih baik dan melanjutkan rangkaian kegiatan advokasi diantaranya:

5. Permasalahan yang dihadapi

- a. Keluarga kurang fokus terhadap pelaksanaan kegiatan dikarenakan masih memikirkan pekerjaan di luar.
- b. Fasilitator belum maksimal dalam memberikan informasi saat kegiatan.

6. Faktor yang menunjang

Adanya dukungan dari pimpinan, Pembina Fungsi terhadap pelaksanaan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

7. Sebagai Rekomendasi Perbaikan ke depan

Meningkatkan informasi dan edukasi kepada sasaran keluarga dalam rangka meningkatkan daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

8. Upaya yang Telah Dilakukan

BNN Provinsi Kalteng telah melakukan koordinasi yang lebih baik dan melanjutkan rangkaian kegiatan advokasi di antaranya:

- 1) Mengembangkan desa bersinar yang telah dibentuk sehingga dapat secara mandiri melaksanakan kegiatan-kegiatan desa bersinar;
- 2) Menambah desa bersinar baru sehingga lebih banyak lagi desa yang bebas dari narkoba;

- 3) Melakukan Pemantauan secara berkelanjutan kepada keluarga yang telah mendapatkan Fasilitas Ketahanan Keluarga.

9. Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target nasional

Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi). Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
- 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
- 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
- 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja

Target nasional dektara untuk tahun 2024 adalah 84, 643 dengan capaian Indeks nasional dektara untuk tahun 2024 adalah 86,787. Nilai Dektara Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran mencapai lebih dari 88,30 yakni termasuk berkategori sangat tinggi. Artinya capaian Dektara Provinsi Kalimantan Tengah jauh melebihi target nasional BNN RI. (Sumber: Surat Plt.Deputi Pencegahan Nomor B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN tanggal 23 Desember 2024 Perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Tahun 2024).



*Rapat Koordinasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba*



*Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba*

**3**

**SASARAN :**

**“Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN”**

Sasaran ketiga di atas dapat di implementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
3.	Jumlah Kabupaten/ Kota dengan Indeks kemandirian partisipasi berkategori Mandiri di Wilayah Provinsi	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	100%

#### 1. Definisi Operasional

Jumlah Instansi Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian partisipasi berkategori mandiri di Wilayah Provinsi adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN terdiri dari Lingkungan Kerja (Pemerintah dan swasta), Lingkungan Pendidikan dan Lingkungan Masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba.

#### 2. Metode Pengukuran

Adapun Instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan

yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia

Adanya pelaku/pelaksana sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak dan berbuat Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di dalam dan di luar lingkungan.

2) Metode

Adapun metode dalam pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melalui Pelatihan, Konseling, dan pelaksanaan tes urin atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.

3) Anggaran

Adanya dukungan anggaran Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk melaksanakan kegiatan di dalam dan di luar lingkungan masing-masing.

4) Material

Adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di dalam dan di luar lingkungannya.

5) Sistem (kebijakan)

Adanya sistem, regulasi aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungannya.

6) Aktivitas

Adanya kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah Pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Pengukuran dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah kemandirian P4GN baik input, output dan outcome dari masing-masing Instansi/lembaga

di Wilayah kabupaten/kota dengan Kategori mandiri. Prosedur pengukuran melalui Pembagian Kuesioner IKP kepada Para Penggiat yang telah mengikuti kegiatan Pengembangan kapasitas (workshop) yang diselenggarakan oleh BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran. Identitas kawasan / Wilayah rawan Narkoba yang diintervensi/ mendapatkan program Pemberdayaan Anti Narkoba.

### 3. Hasil Pengukuran

Kawasan / Wilayah rawan Narkoba yang di Intervensi/ mendapatkan program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba. Dari 2 Kabupaten/Kota yang menjadi target BNN Provinsi Kalimantan Tengah semua BNN Kabupaten/Kota mendapatkan nilai Indeks Kemandirian partisipasi di atas target yang ditetapkan dengan Sangat Mandiri. Adapun rincian capaiannya sebagai berikut :

No	Satker	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
1.	BNN Kota Palangka Raya	3,25	3,54	108,9 %	Sangat Mandiri
2	BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3,25	3,94	121,2 %	Sangat Mandiri
3	BNN Provinsi Kalimantan Tengah	3.25	3,56	109,5%	Sangat Mandiri

Indikator kinerja Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks kemandirian Partisipasi berkategori Sangat Mandiri di Wilayah Provinsi untuk capaiannya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan mengalami penurunan dimana tahun 2024 rata –rata capaian 113,2 % dibanding tahun 2023 yang hanya 114,7% tetapi ini masih dalam kategori Sangat mandiri.

### 4. Perbandingan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir

Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir:

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	-	-	-
2021	2 kab/ kota	2 kab/ kota	100%
2022	2 kab/ kota	2 kab/ kota	100%

2023	2 kab/ kota	2 kab/ kota	100%
2024	2 kab/ kota	2 kab/ kota	100%

Pada tahun 2020, kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat memiliki indikator kinerja yang berbeda dengan tahun 2023 dan 2024 yakni Jumlah instansi/ lingkungan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba. Perbedaan indikator ini mengakibatkan capaian kinerja 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022, 2023 dan 2024. Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, secara persentase, maka capaian kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah tetap sebesar 100 %. Semua BNNK berhasil mencapai target pada tiga tahun berturut-turut.

#### 5. Permasalahan yang dihadapi

Ada beberapa faktor yang menyebabkan program pemberdayaan peran serta masyarakat khusus advokasi kebijakan KOTAN menjadi kurang optimal, di antaranya:

- 1) Kurangnya konsistensi lembaga dalam mengikuti proses kegiatan pemberdayaan.
- 2) Pengambil kebijakan dalam instansi/lingkungan sebagian mengirimkan perwakilan untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan.
- 3) Sebagian peserta kegiatan tidak melaporkan hasil kegiatan (rencana tindak lanjut) kepada pimpinan lembaga dan juga pelaksanaan kegiatan tidak dilaporkan ke BNN Provinsi Kalimantan Tengah
- 4) Belum semua instansi menerapkan regulasi atau aturan-aturan yang mengikat dalam hal P4GN dan regulasi yang sudah ada belum dilaksanakan dengan baik.
- 5) Penganggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat anti narkoba belum menjadi prioritas di beberapa lembaga dikarenakan belum masuk dalam penilaian kinerja lembaga

#### 6. Faktor yang menunjang

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian target karena adanya koordinasi yang baik antara BNN dengan stakeholder terkait.

7. Sebagai Rekomendasi Perbaikan ke depan

Pada Triwulan ke IV Kegiatan Bimtek Penggiat P4GN pada semua jajaran BNN Kabupaten/Kota telah berjalan sehingga di Bulan November dan awal Desember kegiatan Monitoring dan evaluasi sudah bisa dilaksanakan untuk menilai tingkat kemandirian semua Stakeholder yang sudah diberikan kegiatan pengembangan kapasitas sebelumnya.

8. Upaya yang Telah Dilakukan

- a. BNN Provinsi Kalimantan Tengah telah meningkatkan advokasi kebijakan KOTAN.
- b. Pembinaan dan koordinasi serta melanjutkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan seperti melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan regulasi berupa Perda.
- c. Pembentukan tim KOTAN.
- d. Pembuatan RAD, sosialisasi, deteksi dini melalui tes urine.

9. Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target nasional

Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2024 rata-rata secara nasional adalah 3,59 (Sumber: B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN tanggal 11 Desember 2024 Perihal Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2024). Sementara target nasional nilai Indeks Kemandirian partisipasi BNN RI adalah 3,30 (Sumber Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024). Rata-rata nilai Indeks Kemandirian partisipasi BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran mencapai 3,68. Sehingga capaian Indeks Kemandirian Partisipasi Provinsi Kalimantan Tengah melebihi rata-rata secara nasional.



*Bimtek Penggiat P4GN*

**4 SASARAN :**  
**“Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba secara Berkelanjutan”**

Sasaran keempat di atas diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
4.	Jumlah Kawasan rawan di Wilayah Provinsi yang beralih status dari bahaya menjadi waspada	1 (satu) Kawasan/ Wilayah Rawan	1	100%
5.	Nilai Keterpulihan Kawasan rawan yang diintervensi	2,5	2,89	115,6%

**Indikator kinerja : Jumlah Kawasan rawan di Wilayah Provinsi yang beralih status dari bahaya menjadi waspada**

1. Definisi Operasional

Keterpulihan suatu kawasan rawan adalah ditentukan berdasarkan indeks keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba dengan jumlah kawasan atau wilayah rawan narkoba yang di intervensi mendapatkan Program Pemberdayaan Anti narkoba

## 2. Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan dengan melakukan Penilaian Hasil Capaian melalui Monitoring dan Evaluasi terhadap Program dan kegiatan dalam Upaya P4GN dan ada beberapa lagi item pengukuran antara lain yaitu Penyelenggaraan Program, Pelaksana Program, Keberlanjutan Program, Sinergitas Instansi Pemerintah, Kemitraan Dunia Usaha, Pelibatan Organisasi Sosial Masyarakat dan hasil Program yang dirasakan Masyarakat.

Prosedur pengukuran melalui penelitian/survey pada kawasan rawan sejauh mana aturan atau kebijakan dan pelaksanaan Program Kegiatan dalam Upaya P4GN.

Identitas kawasan / Wilayah rawan Narkoba yang di Intervensi mendapatkan program Pemberdayaan Anti Narkoba :

- a. Nama wilayah : Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Jumlah di Bina : 15 Orang yang berasal dari masyarakat kawasan rawan dan masyarakat yang mempunyai keluarga mantan pecandu Narkoba.
- c. Pelatihan lifeskill : Pembuatan pisau panen sawit dodos/egrek
- d. Pihak/Instansi Pemerintah yang Membantu :
  1. Badan Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Timur
  2. Camat Baamang
  3. Lurah Baamang Barat Beserta Jajaran
  4. BRI Cabang Sampit
  5. Perusahaan Sawit
  6. Ketua RT/Tokoh Masyarakat; Mendampingi masyarakat binaan dan menjadi fasilitator antara masyarakat binaan dengan BNNP Kalteng dan Pemerintah setempat
- e. Kawasan : Perkotaan.
- f. Pada akhir tahun diadakan perhitungan Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) Narkoba dengan menggunakan aplikasi IKRN berbasis web. Pengambilan data dengan menggunakan aplikasi IKRN

(<https://ikrn.intioptima.com/>) kepada 30 orang warga masyarakat, 1 Lurah, 2 Aparat Penegak Hukum.

## 2. Hasil Pengukuran

Selain itu juga telah dilakukan perhitungan kuesioner program dan kegiatan kewirausahaan (KPKK) untuk mengevaluasi program dan kegiatan kewirausahaan masyarakat yang telah dilakukan di kawasan rawan, ada 10 aspek yang dinilai yaitu:

- a. Aspek Program Kewirausahaan
- b. Aspek Manajemen Program
- c. Aspek Jejaring Kerja Dalam Program
- d. Aspek Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Program
- e. Aspek Dukungan Dunia Usaha Dalam Program
- f. Aspek Dukungan Praktisi & Akademisi Dalam Program
- g. Aspek Keberlanjutan Kegiatan Dalam Program
- h. Aspek Pembinaan Usaha Dalam Program
- i. Aspek Manfaat (Efek) Program Terhadap keberdayaan masyarakat
- j. Aspek Dampak Program Terhadap Lingkungan Bersih Narkoba

Aspek-aspek tersebut dituangkan dalam Kuesioner Program dan Kegiatan Kewirausahaan (KPKK) dan Kuesioner tersebut diisi oleh warga penerima program lalu diolah dengan hasil perhitungannya sbb:

HASIL PERHITUNGAN KUSIOENER PENILAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN													
PROGRAM PEMBERDAYAAN ALTERNATIF DI KELURAHAN BAAMANG BARAT KEC. BAAMANG KAB. KOTIM - BNNP KALTENG TAHUN 2024													
Respon- den	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	Aspek 4	Aspek 5	Aspek 6	Aspek 7	Aspek 8	Aspek 9	Aspek 10	Total	Rata-rata	Kategori
1	4	4	3	2	2	1	2	3	2	3	26	2.60	Baik
2	4	4	2	2	1	1	3	3	2	3	25	2.50	Cukup
3	4	4	3	2	2	1	2	3	2	3	26	2.60	Baik
4	4	4	3	2	2	1	2	3	2	3	26	2.60	Baik
5	4	4	2	2	2	1	2	3	2	3	25	2.50	Cukup
6	4	4	3	2	2	1	2	3	2	3	26	2.60	Baik
7	4	4	3	2	2	1	2	3	2	3	26	2.60	Baik
8	4	4	2	2	2	1	2	3	2	3	25	2.50	Cukup
9	4	4	2	2	2	1	2	3	2	3	25	2.50	Cukup
10	4	4	2	2	2	1	2	3	2	3	25	2.50	Cukup
11	4	4	3	2	2	1	2	3	2	3	26	2.60	Baik
12	4	4	3	2	2	1	2	3	2	3	26	2.60	Baik
13	4	4	2	2	2	1	2	3	2	3	25	2.50	Cukup
14	4	4	3	2	2	1	2	3	2	3	26	2.60	Baik
15	4	4	3	2	2	1	2	3	2	3	26	2.60	Baik
Jumlah	60	60	39	30	29	15	31	45	30	45	384	38.40	
Rata-rata	4.00	4.00	2.60	2.00	1.93	1.00	2.07	3.00	2.00	3.00	2.56		Baik
Kategori	Sangat Baik	Sangat Ba	Baik	Cukup	Cukup	Buruk	Cukup	Baik	Cukup	Baik	Baik		

Dari hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan kuesioner penilaian program dan kegiatan kewirausahaan bernilai 2,56 (baik). Setelah dilakukan perhitungan dari 15 Kuesioner yang diisi oleh warga penerima program, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Program dan kegiatan kewirausahaan masyarakat kawasan rawan narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan penilaian masing-masing responden/Masyarakat (15 Responden) terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kewirausahaan dengan kategori “Baik” dengan rincian 9 responden kategori “baik” dan 6 responden kategori “cukup”.
- b. Berdasarkan penilaian responden/masyarakat terhadap 10 aspek pelaksanaan program dan kegiatan kewirausahaan, dengan kategori “sangat Baik” ada 2 aspek yaitu aspek program kewirausahaan dan manajemen program, sedangkan kategori “Baik” ada 3 aspek yaitu aspek jejaring kerja dalam program, pembinaan usaha dalam program dan dampak program terhadap lingkungan bersih narkoba. Kategori lain yaitu 3 aspek kategori cukup yaitu dukungan pemda, dukungan dunia usaha dan Manfaat (efek) program terhadap keberdayaan masyarakat serta 1 aspek kategori buruk yaitu aspek Dukungan Praktisi & Akademisi Dalam Program
- c. Nilai akhir rata-rata seluruh responden/masyarakat terhadap seluruh pelaksanaan program dan kegiatan kewirausahaan, dengan kategori Baik dengan nilai rata-rata 2,56 (Baik).

### **Kegiatan yang telah dilakukan**

Kawasan atau wilayah rawan yang diintervensi program pemberdayaan alternatif BNN Provinsi Kalimantan Tengah menyasar di Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur karena berdasarkan hasil pemetaan kawasan dengan menggunakan 8 indikator utama dan 5 indikator pendukung, daerah tersebut dikategorikan wilayah “BAHAYA”. Pembinaan kawasan rawan narkoba oleh BNN Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan dalam bentuk Bimtek lifeskill Pembuatan Pisau Panen Sawit

(Dodos/Egrek). Pemberdayaan di wilayah ini sudah dapat dikatakan berhasil karena para peserta mampu secara mandiri membuat pisau dodos dan Egrek bahkan bisa membuat jenis pisau lainnya untuk keperluan sehari-hari, untuk pemasaran masih sistem pesan dari masyarakat sekitar.



*Hasil / Produk Pembuatan Pisau Dodos sawit/ Egrek di Kelurahan Baamang Barat*

#### 4. Perbandingan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir

Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir :

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	1 kawasan	1 kawasan	100%
2021	1 kawasan	1 kawasan	100%
2022	1 kawasan	1 kawasan	100%
2023	1 kawasan	1 kawasan	100%

Pada tahun 2020, kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif memiliki indikator kinerja Jumlah kawasan/ wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif. Pada tahun 2021, 2022, 2023 Jumlah Kawasan rawan di Wilayah Provinsi yang beralih status dari bahaya menjadi waspada. Sekilas indikator di 2020 dan tahun-tahun berikutnya terlihat berbeda, namun sebenarnya untuk tahun 2021 dan 2022 ditambahkan target kualitas

berupa status rawan. Sejak tahun 2020 hingga 2023 capaian kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah tetap yakni sebesar 100%.

#### 5. Permasalahan yang dihadapi

Program pemberdayaan alternatif membutuhkan peran serta seluruh pihak terutama dukungan dari dunia usaha dan akademisi. Program Pemberdayaan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat karena merubah cara pandang dan cara hidup masyarakat memerlukan waktu yang cukup panjang dengan dukungan sumber daya yang memadai. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja ini adalah masih kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat daerah rawan dengan berbagai latar belakang dan alasan.

#### 6. Faktor yang menunjang

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian target karena adanya koordinasi yang baik antara BNN dengan stakeholder terkait.

#### 7. Sebagai Rekomendasi Perbaikan ke depan

BNN Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan pendamping program, aparat kelurahan dan BPD akan melakukan monitoring ke wilayah untuk mengetahui perkembangan program, selain itu juga terus akan membangun jejaring kerja kewirausahaan dengan para stakeholder yang ada.

Dalam hal perekrutan peserta bimbingan teknis *lifeskill* akan lebih memprioritaskan kepada mantan pecandu Narkoba atau keluarganya dan masyarakat miskin yang berada di lingkungan kawasan rawan Narkoba serta masyarakat yang mempunyai motivasi yang tinggi untuk berwirausaha.

#### 8. Upaya yang Telah Dilakukan

- a. BNN Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan fasilitator telah melakukan bimtek fasilitator (pendamping).
- b. Melibatkan stakeholder dan melakukan monitoring ke wilayah untuk mengetahui perkembangan program.

## 9. Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target nasional

Target nasional Jumlah Kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari bahaya menjadi waspada adalah 84 kawasan sementara Jumlah Kawasan rawan di Wilayah Provinsi yang beralih status dari bahaya menjadi waspada mencapai 1 kawasan. Sehingga BNN Provinsi Kalimantan Tengah berkontribusi dalam mengurangi jumlah kawasan rawan yang ada di Indonesia.

### **Indikator kinerja : Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang Diintervensi**

#### 1. Definisi Operasional

Keterpulihan suatu kawasan rawan adalah ditentukan berdasarkan indeks keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba dengan jumlah kawasan atau wilayah rawan narkoba yang di Intervensi mendapatkan Program Pemberdayaan Anti narkoba.

#### 2. Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan dengan Penilaian Hasil Capaian melalui Monitoring dan Evaluasi terhadap Program dan kegiatan dalam Upaya P4GN dan ada beberapa lagi item pengukuran antara lain yaitu Penyelenggaraan Program, Pelaksana Program, Keberlanjutan Program, Sinergitas Instansi Pemerintah, Kemitraan Dunia Usaha, Pelibatan Organisasi Sosial Masyarakat dan hasil Program yang dirasakan Masyarakat.

#### 3. Hasil Pengukuran

Pada akhir tahun diadakan perhitungan Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) Narkoba dengan menggunakan kuesioner. Pengambilan data dengan menggunakan aplikasi berbasis Web. Ada Perbedaan dengan pengukuran tahun sebelumnya menggunakan kuesiner secara langsung ke 15 responden atau warga penerima manfaat. Tahun 2024 pengukurannya menggunakan aplikasi IKRN yang berbasis web, dimana isi kuesioner dalam aplikasi tersebut terkait dengan 3 variabel utama yaitu faktor yang mempengaruhi kerentanan narkoba, *demand reduction* dan *supply reduction*. Adapun target dari pengambilan data adalah 30 orang perwakilan masyarakat, 1 kepala

Desa/Lurah dan 2 orang aparat penegak hukum dalam hal Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan aplikasi IKRN (<https://ikrn.intioptima.com>). Untuk Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringan Timur yang menjadi lokasi intervensi program dayatif, nilai Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) sebesar 2,89 dengan kategori “Aman”, yang sebelumnya kelurahan tersebut dalam kategori “Bahaya”. Dengan demikian Kelurahan Baamang tersebut berhasil dipulihkan dari kawasan rawan narkoba menjadi kawasan aman.

#### 4. Perbandingan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir

Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir:

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	-	2,54	-
2021	1,8	3,17	176,11%
2022	2,85	2,97	104,3%
2023	2,97	2,97	100%
2024	2,5	2,89	115,60%

Pada tahun 2020, kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif memiliki indikator kinerja Jumlah kawasan/ wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif dengan hasil perhitungan nilai IKKR 2,54 namun tidak ada target awal. Sedangkan pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 telah ada target IKKR untuk kawasan rawan yang diintervensi. Target pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 telah tercapai. Namun sebenarnya tidak dapat dibandingkan karena lokasi kawasan rawan yang diintervensi berpindah setiap tahunnya.

#### 5. Permasalahan yang dihadapi

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja ini adalah masih kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat daerah rawan dengan

berbagai latar belakang dan alasan. Program pemberdayaan alternatif membutuhkan peran serta seluruh pihak terutama dukungan dari dunia usaha dan akademisi. Program Pemberdayaan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat karena merubah cara pandang dan cara hidup masyarakat memerlukan waktu yang cukup panjang dengan dukungan sumber daya yang memadai.

#### 6. Faktor yang menunjang

Terlibatnya para pemangku kepentingan yang ada di wilayah kawasan rawan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi sehingga mereka mempunyai rasa memiliki dan menjadi bagian dari program menjadi kunci keberhasilan program disamping itu tenaga pelaksana program terus mengadvokasi mereka untuk terus berupaya mengubah kawasan rawan menjadi kawasan bersih dari narkoba.

#### 7. Sebagai rekomendasi perbaikan ke depan

BNN Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan fasilitator akan melakukan bimtek fasilitator (pendamping), pelibatan stakeholder dan melakukan monitoring ke wilayah untuk mengetahui perkembangan program, selain itu juga terus akan membangun jejaring kerja kewirausahaan dengan para stakeholder yang ada. Dalam hal perekrutan peserta bimbingan teknis lifeskill akan lebih memprioritaskan kepada mantan pecandu narkoba atau keluarganya dan masyarakat miskin yang berada di lingkungan kawasan rawan narkoba.

#### 8. Upaya yang Telah Dilakukan

- a. BNN Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan fasilitator telah melakukan bimtek fasilitator (pendamping).
- b. Melibatkan stakeholder dan melakukan monitoring ke wilayah untuk mengetahui perkembangan program.

#### 9. Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target nasional

Target nasional nilai Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang Diintervensi adalah 2,57 (Sumber:Paparan Monitoring & Evaluasi Implementasi Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2024 oleh Direktur Pemberdayaan Alternatif BNN tanggal 23 Desember 2024) sementara

Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang Diintervensi Kalimantan Tengah mencapai 2.89. Sehingga capaian Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang Diintervensi Kalimantan Tengah melebihi target nasional BNN RI.

**5. Sasaran : Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba**

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE
6.	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	79,5 %	116,91%

**Indikator Kinerja : Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup**

1. Definisi Operasional

Data dan informasi terkait persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan tujuan mengetahui perubahan kualitas hidup setelah mendapatkan intervensi layanan rehabilitasi.

2. Metode Pengukuran

Hasil Instrumen WHOQOL yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam 1 kali periode perawatan.

3. Hasil Pengukuran

Bedasarkan hasil akumulasi penghitungan kualitas hidup dari domain kondisi fisik, psikologis, sosial dan lingkungan pada saat awal menerima layanan dan dibandingkan dengan akumulasi hasil penghitungan setelah mendapatkan intervensi layanan rehabilitasi atau selesai program.

Satker	WHOQoL			%Fisik	%Psikologis	%Sosial	%Lingkungan	%
	Psikologis	Sosial	Lingkungan					
<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>118</b>	<b>115</b>	<b>125</b>	<b>79,33</b>	<b>78,67</b>	<b>76,67</b>	<b>83,33</b>	<b>79,5</b>
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	23	27	29	84,85	69,7	81,82	87,88	81,06
BNN Kota Palangkaraya	30	31	28	74,36	76,92	79,49	71,79	75,64
BNNP Kalimantan Tengah	65	57	68	79,49	83,33	73,08	87,18	80,77

4. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Selama Beberapa Tahun Terakhir Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir:

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	63%	71,43%	113%
2024	68%	79,5%	116,91%

Pada tahun 2020-2023 target persentase penyalahguna dan/atau pecandu yang mengalami peningkatan kualitas hidup belum menjadi target BNN Provinsi Kalimantan Tengah walaupun sudah ada dalam target BNN RI (Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024). Selama dua tahun BNN Provinsi Kalimantan Tengah dapat melebihi target nasional BNN RI di Renstra.

5. Permasalahan yang dihadapi

Tingkat pendidikan, faktor usia anak serta kendala bahasa berpengaruh dalam pemahaman klien terhadap pertanyaan pada pengisian WHOQOL

6. Faktor yang menunjang

Sosialisasi kepada konselor yang menangani terkait 2 kali pelaksanaan WHOQOL (awal dan akhir program).

7. Sebagai rekomendasi perbaikan ke depan

Pendampingan oleh konselor terhadap klien yang dengan tingkat pendidikan rendah atau pada klien anak serta klien yang tidak lancar berbahasa Indonesia

8. Upaya yang Telah Dilakukan

- 1) Konselor membacakan pertanyaan pada klien yang tidak bisa membaca dan menulis

- 2) Menggunakan atau secara online pada klien yang tidak bisa hadir atau domisili sangat jauh.
9. Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target nasional
- Target persentase penyalahguna dan/atau pecandu yang mengalami peningkatan kualitas hidup tahun 2024 untuk BNN RI adalah 65% (Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024) sedangkan persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup di BNN Provinsi Kalimantan Tengah adalah 79,5%. Capaian kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah melebihi target BNN RI untuk tahun 2024.

**6. Sasaran : Meningkatkan kapasitas tenaga teknis rehabilitasi.**

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE
7.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 orang	10 orang	100%

**Indikator Kinerja : Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih**

1. Definisi Operasional

Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah jumlah agen pemulihan yang dilatih.

2. Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan dengan menghitung total petugas penyelenggara layanan IBM (agen pemulihan) yang dilatih.

3. Hasil Pengukuran

Dari target 30 orang yang mendapatkan pelatihan di BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajarannya terdapat realisasi 30 orang yang diberikan

pelatihan. Adapun petugas yang telah dilatih untuk layanan IBM yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	NO. HP	BINAAN	KET
1.	HENDRIANI	Pahandut Seberang	082155601070	BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PETUGAS AGEN PEMULIHAN
2.	SAHMIYADI	Pahandut Seberang	082149903309		
3.	MUSLIMAH	Pahandut Seberang	085249213328		
4.	RUSLAN	Pahandut Seberang	082151053392		
5.	RAHMAN	Pahandut Seberang	085753434332		
6.	DALDIRI	Baamang Barat	085849784558		
7.	ERIK SUSANTO	Baamang Barat	085249214902		
8.	ALYAUMIL RESTI RAHMALİYANDI	Baamang Barat	089513596060		
9.	ADITIYA TAGAF	Baamang Barat	085750682973		
10.	MUHAMMAD TAUFIK	Baamang Barat	082255639969		
11.	ICAI	Jl. Massa, Kel. Banturung	082358533931	BNN KOTA PALANGKA RAYA	
12.	NURUL ERNAWATI	Jl. Pembataan, Kel. Banturung	081251808202		
13.	BONARI	Jl. Padat Karya, Kel. Banturung	082158881600		
14.	YULIANTI, S.Sos	Jl. Tjilik Riwut, KM 31,5, Kel. Banturung	085252603721		
15.	DEVI CERITASARI	Jl. Perkebunan, Kel. Banturung	087793467884		
16.	I WAYAN BIMO SENO	Jl. Tjilik Riwut, KM 3,5, Kel. Bukit Tunggul	081351121091		
17.	GAGAH CAHYADI	Jl. Simpati 10, Kel. Bukit Tunggul	081338047965		
18.	M. FADLUN	Jl. Mahir Mahar, Kel. Bukit Tunggul	081349261909		
19.	TRI H. M	Jl. Piranha 16, Kel. Bukit Tunggul	081522507725		
20.	JUMIATI	Jl. Mutiara KM.4	082351276038		
21.	SERI YATI, A.Md	Jl. Dah. Hamzah Kel. Mendawai	085752639587	BNNK KOTAWARIN GIN BARAT	
22.	RUDI FIRDIANSYAH	Jl. Prakusuma Yudha No. 34 Kel. Mendawai	085828152521		
23.	SUHARDI	Jl. Abdul Ancis, Kel. Mendawai	085705766145		

24.	MIMIKNAWATY	Jl. Hasanudin Kel.Mendawai	081522709879		
25.	HATMAWATI	Jl. Jendral Sudirman, Kel.Mendawai	085251016699		
26.	DEWI ROSIANA	Jl. Mangga, Kel. Candi	082255529687		
27.	YULIANA	Jl. Mangga, Kel. Candi	081345001311		
28.	HENI ARIANTI	Jl. Mangga, Kel. Candi	089530647794		
29.	NOVITA DEWI	Jl. Mangga, Kel. Candi	85753625510		
30.	DHAINANDA AGUSTIN	Jl. Mangga, Kel. Candi	082151891552		

#### 4. Perbandingan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir

Berikut target dan realisasi capaian kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran selama beberapa tahun terakhir :

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	-	-	100%
2021	10 orang	10 orang	100%
2022	15 orang	15 orang	100%
2023	30 orang	30 orang	100%
2024	30 orang	30 orang	100%

Pada tahun 2020, kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi memiliki indikator kinerja yang berbeda dengan tahun 2021, 2022 dan 2023 yakni jumlah fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang operasional. Perbedaan indikator ini mengakibatkan capaian kinerja 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun selanjutnya. Namun untuk tahun 2021, 2022 dan 2023, 2024 semua target tercapai. Sehingga empat tahun berturut-turut capaian sebesar 100%.

#### 5. Permasalahan yang dihadapi

- 1) Waktu pelatihan terlalu singkat sehingga Petugas AP kesulitan mendalami materi yang diberikan.
- 2) Belum semua Pemateri dan Pendamping IBM mendapatkan pelatihan

dari BNN RI.

- 3) Waktu pelaksanaan pelatihan AP dipertengahan tahun karena menunggu pelatihan untuk pendamping IBM sehingga waktu untuk layanan IBM menjadi lebih singkat.
- 4) Petugas AP kesulitan dalam mengimplementasikan materi dalam pelaksanaan layanan.

#### 6. Faktor yang menunjang

- 1) Dukungan dari Lurah/ Kepala desa dalam merekomendasikan LPMK, Peksos, RT di kelurahan setempat sebagai Calon Petugas AP yang akan diberikan peningkatan kemampuan.
- 2) Petugas AP sudah terbiasa melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan.

#### 7. Sebagai rekomendasi perbaikan ke depan

- 1) Waktu pelaksanaan pelatihan pendamping AP dan pelatihan AP agar dilakukan diawal tahun.
- 2) Menambah jam pelajaran untuk petugas AP agar bisa memahami materi secara mendalam.

#### 8. Upaya yang Telah Dilakukan

- 1) Memberikan bimbingan teknis/ memperdalam materi pada saat melakukan Asistensi
- 2) Memberikan bimtek dari pendamping AP yang telah mendapatkan peningkatan kemampuan kepada rekan kerja yang akan menjadi pemateri pada pelatihan AP.
- 3) Mendampingi secara intens petugas AP dalam melaksanakan layanan sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana.

#### 9. Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target nasional

Target BNN RI tahun 2024 untuk jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah 900 orang. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang dilatih BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran adalah 30 orang. BNN Provinsi Kalimantan Tengah berkontribusi dalam pencapaian target tersebut.

**7.****Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba**

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE
8.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah Provinsi	1	1	100%
9.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi	6	6	100%

**1. Definisi Operasional**

Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah lembaga yang memenuhi capaian lembaga rehabilitasi dengan kriteria target pemenuhan 70%-85%. Jika masuk dalam target pemenuhan mana dinyatakan memenuhi syarat.

**2. Metode Pengukuran**

Pengukuran dilakukan oleh PJ SNI BNN Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan form persyaratan umum dan khusus yang harus dipenuhi dalam SNI 8807;2022 kemudian PJ melakukan paparan secara virtual pada direktorat PLRKM dan menyampaikan data dukung dan hasil penilaiannya. Kemudian direktorat PLRKM melakukan penilaian dan evaluasi.

**3. Hasil Pengukuran**

Adapun daftar lembaga di Kalimantan Tengah yang telah dinilai dan memenuhi verifikasi pemenuhan SPM/SNI regular Tipe 3 tahun 2024 adalah:

NO	NAMA LEMBAGA	SETING LAYANAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE
1	RSUD Dr.H. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas	Rawat Jalan-Medis	70 %	97,44 %	139,2 %

4. Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir:

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	-	-	-
2021	-	1 lembaga	-
2022	2 lembaga	2 lembaga	100%
2023	1 lembaga	2 lembaga	200%
<b>2024</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>100%</b>

Pada tahun 2020, kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Pemerintah memiliki indikator kinerja yang berbeda dengan tahun 2021 dan 2022. Perbedaan indikator ini mengakibatkan capaian kinerja 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022. Untuk tahun 2021 BNN Provinsi Kalimantan Tengah tidak ditargetkan jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi SPM tetapi BNN Provinsi di Kalimantan Tengah ternyata terdapat 1 lembaga yang memenuhi SPM. Pada tahun 2022 ditargetkan 2 lembaga yang memenuhi SPM dan berhasil tercapai 100% dengan kategori nilai A untuk Klinik BNNK Kotawaringin Barat dan B untuk Klinik Berkah BNNK Palangka Raya. Terdapat peningkatan jumlah lembaga yang memenuhi pelayanan SPM dari 2021 ke 2022. Pada tahun 2023 indikator penilaian yang digunakan adalah SNI Reguler 8807:2022 dimana ada 2 lembaga yang di ajukan yakni Klinik BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan RSJ. Kedua lembaga ini dinyatakan memenuhi syarat setelah dilakukan Evaluasi SNI. Sedangkan untuk tahun 2024 target SPM 1 lembaga yaitu RSUD Dr.H. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas dengan hasil memenuhi syarat SNI reguler tipe 3.

#### 5. Permasalahan yang dihadapi

- 1) Anggaran untuk melakukan penilaian ke Lembaga SPM tersedia sebanyak 2 (dua) kali melalui Bimbingan Teknis dan Monitoring dan Evaluasi;
- 2) Petugas Layanan Rehabilitasi di Poli Adiksi RSUD Dr.H. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas hanya berjumlah 5 (lima) orang, sehingga perlu adanya tambahan petugas layanan.
- 3) Tidak semua petugas telah mendapatkan Pelatihan terkait adiksi sehingga perlunya peningkatan Kompetensi agar dapat memberikan layanan yang lebih optimal.
- 4) Persyaratan Administrasi perlu ditingkatkan untuk kelengkapan berkas SNI di RSUD Dr.H Soemarno Sosroatmodjo Kapuas.

#### 6. Faktor Penunjang

- 1) Koordinasi penanggung Jawab SNI BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajarannya untuk pemenuhan Layanan Rehabilitasi yang sesuai dengan SNI kepada lembaga yang dijadikan target untuk SNI tahun 2024 dengan mengikutsertakan Direktur RS dan tim manajemen layanan RS;
- 2) Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi kepada lembaga yang menjadi target untuk pemenuhan SNI 2024.

#### 7. Sebagai rekomendasi perbaikan ke depan

- 1) Memenuhi kelengkapan dokumen mulai dari penerimaan awal yang sesuai standar dan melakukan peningkatan baik penunjang layanan secara berkala;
- 2) Berkoordinasi dengan secara intens, baik secara langsung maupun virtual dengan Pihak RSUD Dr.H. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas guna pemenuhan dan peningkatan layanan rehabilitasi baik secara administrasi maupun sarana prasarana yang ada.
- 3) Mengajukan petugas untuk mengikuti pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kompetensi dalam layanan rehabilitasi;

#### 8. Upaya yang Telah Dilakukan

Pembinaan secara berkelanjutan di lembaga rehabilitasi yang diajukan sebagai SNI Reguler 8807:2022.

9. Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target nasional

Target BNN RI untuk jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar adalah 90 lembaga (Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024) sedangkan jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar di BNN Provinsi Kalimantan Tengah adalah 1 lembaga. BNN Provinsi Kalimantan Tengah berkontribusi dalam pencapaian target tersebut.

**Indikator kinerja : Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi**



*Asistensi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat*

1. Definisi Operasional

Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah jumlah IBM yang aktif dan melakukan layanan.

2. Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan dengan penghitungan jumlah IBM yang aktif dan melakukan layanan.

### 3. Hasil Pengukuran

Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah 6 unit dengan rincian realisasi sebagai berikut :

No	Fasilitas	Jumlah Pasien	Keterangan Fase IBM
1.	IBM Bersinar	5 orang	Tangguh
2.	IBM Cakra	9 orang	Tangguh
3.	IBM Bukit Tunggul	4 orang	Tangguh
4.	IBM Banturung	7 orang	Tangguh
5.	IBM Candi Mas	4 orang	Tangguh
6.	IBM Mendawai Sega	4 orang	Tangguh
<b>TOTAL</b>		<b>33 orang</b>	

### 4. Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir :

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	-	-	-
2021	3 lembaga	4 lembaga	133,33%
2022	3 lembaga	4 lembaga	133,33%
2023	6 lembaga	8 lembaga	133.33%
<b>2024</b>	<b>6 lembaga</b>	<b>6 lembaga</b>	<b>100%</b>

Pada tahun 2020, kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah memiliki indikator kinerja yang berbeda. Perbedaan indikator ini mengakibatkan capaian kinerja 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun selanjutnya. Untuk tahun 2021 capaian persentase 133,33% sama dengan capaian tahun 2022 dan 2023. Sedangkan capaian persentase tahun 2024 sebesar 100%.

### 5. Permasalahan yang dihadapi

- 1) Agen Pemulihan sibuk dan kurang memprioritaskan IBM sehingga pemberian layanan terlambat;

- 2) Adanya bencana banjir menghambat pemberian layanan oleh AP dan klien terdampak;
- 3) Stigma masyarakat yang salah terhadap narkoba dan cenderung permisif terhadap penyalahguna zat;
- 4) Jadwal kerja dari Agen Pemulihan dan klien yang beragam cukup menyulitkan dalam membuat jadwal layanan/pertemuan;
- 5) Minimnya Informasi dari masyarakat walaupun Agen Pemulihan telah melakukan sosialisasi;
- 6) Agen Pemulihan sulit melakukan pertemuan dengan klien karena klien sering membolos sekolah serta rumah yang jauh dari lingkup sekolah;
- 7) Beberapa Agen tidak maksimal dalam keikutsertaan layanan IBM, kurang berkomitmen dalam menyelesaikan layanan IBM.

#### 6. Faktor yang menunjang

- 1) Agen Pemulihan terpilih merupakan peksos dan masih muda sehingga terbiasa dengan teknologi dan fleksibel waktunya;
- 2) Keterlibatan pihak desa/kelurahan dalam pemilihan petugas Agen Pemulihan yang selektif sesuai syarat dan ketentuan;
- 3) Kedekatan AP kepada masyarakat memudahkan AP mendapat dukungan dari masyarakat seperti sarpras;
- 4) Agen Pemulihan yang termasuk salah satu orang yang di segani/dihormati di desa/kelurahan berdampak pada memudahkan dalam melakukan pendekatan dengan warga.
- 5) Pihak sekolah khususnya Guru BK sangat mendukung dan merasa terbantu dengan adanya Agen Pemulihan, untuk mendampingi siswa-siswi yang bermasalah dengan penyalahgunaan Narkoba.
- 6) Pergantian AP yang kurang aktif jika diperlukan sehingga proses kaderisasi bisa segera dilakukan dan tidak menghambat program IBM;
- 7) Melakukan penjangkauan ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah IBM
- 8) Perlunya peraturan khusus agar pihak kelurahan dapat menganggarkan kegiatan IBM supaya dapat berkelanjutan.

7. Sebagai rekomendasi perbaikan ke depan

- 1) Adanya jadwal kegiatan dan evaluasi berkala untuk memantau pekerjaan yang belum selesai di IBM.

8. Upaya yang Telah Dilakukan

Pemilihan Agen Pemulihan yang melibatkan pihak desa/kelurahan setempat guna mendapatkan AP yang kompeten dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kolaborasi kegiatan AP dengan kegiatan kemasyarakatan lain contohnya pemeriksaan kesehatan posyandu lansia, siskamling, membuat sosialisasi terkait adanya AP lebih mudah dikenal dalam masyarakat. Agen pemulihan telah melibatkan Guru BK dan orangtua murid sehingga layanan dapat terus berjalan. Koordinasi dengan pihak kelurahan telah dilakukan guna pendanaan mandiri, namun respons dari pihak kelurahan masih belum ada tindak lanjut.

9. Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target nasional

Target nasional jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat untuk tahun 2024 adalah 148 unit (Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024) sementara jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang dibentuk oleh BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran pada tahun 2024 adalah 6 unit. Sehingga BNN Provinsi Kalimantan Tengah berkontribusi dalam pencapaian target BNN RI dalam hal pencapaian target unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat. (Sumber : Surat Plt. Deputi Rehabilitasi Nomor : B/4244/XII/DE/RH.02.3/2024/BNN tanggal 30 Desember 2024 tentang Pemberitahuan Hasil Evaluasi Operasionalisasi Unit IBM TA 2024).

**8.**

**Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi**

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE
10.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Tengah	3,6	3,7	102,77%

1. Definisi Operasional

Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi (IKM per tahun) adalah hasil dari jumlah total skor penilaian semester 1 dan 2 dibagi jumlah total responden.

2. Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan oleh Deputi Bidang rehabilitasi sebanyak dua kali per tahun (per semester) sesuai amanag Permenpan No.14/2017.

3. Hasil Pengukuran

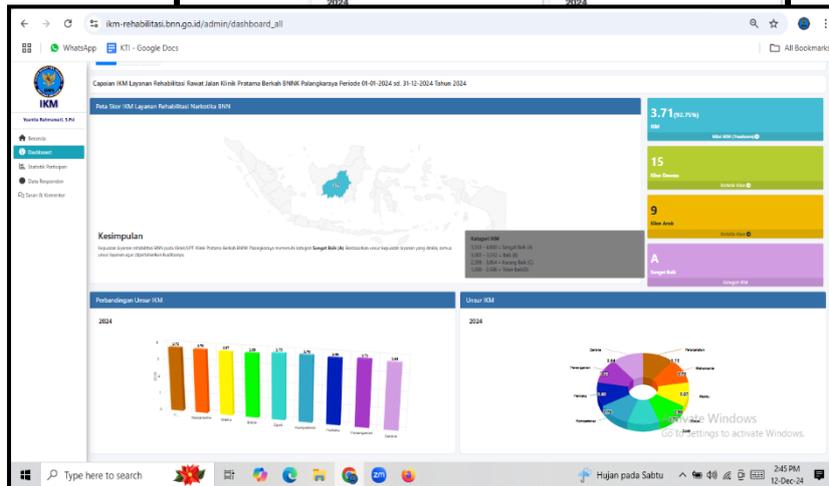
Indikator kinerja untuk indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 102,77%. IKM sebesar 3,7.

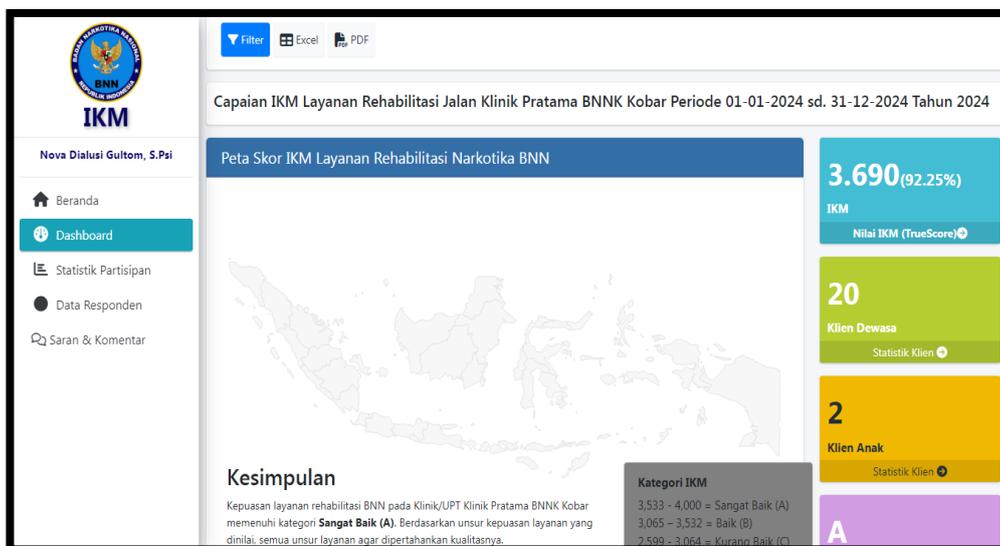
SATUAN KERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
<b>BNN PROVINSI KALTENG</b>	<b>3,6 Indeks</b>	<b>3,7 Indeks</b>	<b>102,77%</b>
BNNK PALANGKA RAYA	3,29 Indeks	3,71 Indeks	112%
BNNK KOTAWARINGIN BARAT	3,28 Indeks	3,69 Indeks	112%

**HASIL CAPAIAN KINERJA BIDANG REHABILITASI  
TAHUN 2024**

Satuan Kerja	IKR	IKM	Persentase Kualitas Hidup
<b>BNN</b>	<b>3.51</b>	<b>3.62</b>	<b>85.32</b>
<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>3.95</b>	<b>3.7</b>	<b>79.64</b>
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3.86	3.69	81.06
BNN Kota Palangkaraya	4	3.71	75.64
BNNP Kalimantan Tengah	4	3.7	81.01

Adapun grafik dan tabel hasil indeks tersebut, yaitu :





Grafik Hasil Pengukuran IKM BNN Kabupaten Kotawaringin Barat

4. Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir :

T.A	TARGET	CAPAIAN BNN PROVINSI KALTENG	PERSENTASE
2020	-	-	-
2021	3,2	-	-
2022	3,4	3,469	102%
2023	3,4	3,81	112%
<b>2024</b>	<b>3,6</b>	<b>3,7</b>	<b>102,77%</b>

Pada tahun 2020, kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Pemerintah memiliki indikator kinerja yang berbeda dengan tahun 2021, 2022 dan 2023. Perbedaan indikator ini mengakibatkan capaian kinerja 2020 tidak dapat

dibandingkan dengan capaian tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Untuk capaian tahun 2024 BNN Provinsi Kalimantan Tengah berada pada angka 3,7.

5. Permasalahan yang dihadapi

Tingkat pendidikan dan faktor usia anak berpengaruh dalam pemahaman klien terhadap pertanyaan pada pengisian survei IKM.

6. Faktor yang menunjang

- 1) Sosialisasi internal kepada petugas layanan secara berkala terkait pengisian survei IKM;
- 2) Inovasi terkait kemudahan klien dalam menjangkau layanan rehabilitasi di BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan Jajaran, misalnya penggunaan aplikasi online pada setiap layanan.

7. Sebagai rekomendasi perbaikan ke depan

- 1) Melakukan review dan perbaikan dalam standar pelayanan, sehingga layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 2) Meningkatkan layanan, kapasitas petugas dan sarana pra sarana yang ada di Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan Jajaran;
- 3) Pada kasus dengan klien atau tingkat pendidikan rendah anak perlu adanya pendampingan saat pengisian karena ada pertanyaan yang mungkin sulit dimengerti atau dipahami.

8. Upaya yang Telah Dilakukan

Penggunaan aplikasi online dan pendampingan pengisian survei terutama kasus anak di BNN Provinsi Kalimantan Tengah.

9. Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target nasional

Target indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika tahun 2024 untuk BNN RI adalah 3,20% (Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024) sedangkan indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika tahun 2024 di BNN Provinsi Kalimantan Tengah adalah 3,70%. Capaian kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah melebihi target BNN RI untuk tahun 2024. (Sumber : Surat Plt. Deputi Rehabilitasi Nomor : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN tanggal 7 Januari 2025 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran IKR, IKM dan Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024).

## 9.

**Sasaran : Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya**

Untuk mencapai sasaran diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
11.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	7 Berkas	16 Berkas	228,57%



*Press Release BNN Provinsi Kalimantan Tengah Atas Pengungkapan Beberapa Kasus di Bulan Desember 2024*

### 1. Definisi Operasional

Jumlah berkas tindak pidana narkotika yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

### 2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran dengan mengakumulasikan jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkotika yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan

dengan kejaksanaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21 untuk dilakukan penuntutan dari unit pusat dan vertikal.

### 3. Hasil pengukuran

Dari target yang ditetapkan sebanyak **7** berkas dapat terealisasi sebanyak **16** berkas atau tercapai sebesar **228 %**, dengan penggunaan anggaran seminimal mungkin sehingga sisa anggaran masih cukup untuk pengungkapan kasus melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkoba berjalan dengan lancar. Adapun rincian jumlah berkas perkara TP Narkoba yang P-21 dapat dilihat pada rincian berikut ini:

Satker BNNK/ Bidang	Target	Realisasi	Persentase
1. BNN PROVINSI Kalimantan Tengah	7	16	228,57 %
2. BNNK Palangka Raya	-	-	-
3. BNNK Kotawaringin Barat	-	-	-

### 4. Perbandingan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir

Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir:

Satker	2022		2023		2024	
	Target	Target	Target	Realisasi	Target	Realisasi
BNN PROVINSI Kalimantan Tengah	8	10	10	20	7	16
BNNK Palangka Raya	1	1	1	1	-	-
BNNK Kotawaringin Barat	1	1	1	2	-	-
Total	10	12	12	23	7	16

Selama tiga tahun, kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba memiliki indikator kinerja yang sama yakni Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21. Perbandingan capaian kinerja selama tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2022	10 berkas	23 berkas	230%
2023	12 berkas	26 berkas	216%
2024	7 berkas	16 berkas	228,57%

Apabila dibandingkan selama tiga tahun berturut-turut, tahun 2022-2024 maka persentase capaian terbesar adalah pada tahun 2023 yakni terdapat 26 berkas perkara yang P-21.

#### 5. Permasalahan yang dihadapi

- 1) Belum adanya kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan Bidang Pemberantasan.
- 2) Belum memadainya peralatan IT yang dimiliki oleh BNN Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung kegiatan penyelidikan dan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba.
- 3) Keterbatasan jumlah personal dan anggaran yang dimiliki oleh BNN Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjangkau wilayah Kalteng yang sangat luas.

#### 6. Faktor yang menunjang

- 1) Seluruh anggota Bidang Pemberantasan dan Intelijen berperan aktif dalam mengumpulkan informasi dari para pelaku tindak pidana narkoba di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2) Militansi dan kreatifitas dari anggota Bidang Pemberantasan dan Intelijen dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkoba.
- 3) Sinergitas antara BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan *Criminal Justice System (CJS)* dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana narkoba.

#### 7. Sebagai Rekomendasi Perbaikan ke depan

- 1) Kolaborasi dengan Direktorat Intelijen BNN RI untuk dukungan peralatan IT dan join operation.
- 2) Meningkatkan kolaborasi bersama seluruh stake holder dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba .
- 4) Meningkatkan pengawasan pintu-pintu masuk penyelundupan narkoba ke wilayah Kalimantan Tengah.
- 3) Meningkatkan kegiatan intervensi dikawasan rawan kampung narkoba dan tempat hiburan malam.

## 8. Upaya yang Telah Dilakukan

Kolaborasi BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan pengelola bandara, pelabuhan, perusahaan transportasi dan perusahaan ekspedisi dalam pengawasan pintu-pintu masuk penyelundupan narkoba ke wilayah Kalimantan Tengah.

## 9. Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target nasional

Target nasional jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 untuk tahun 2024 adalah 725 berkas perkara (Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024) sementara jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 yang dicapai oleh BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran pada tahun 2024 adalah 16 berkas perkara. Sehingga BNN Provinsi Kalimantan Tengah berkontribusi pencapaian target BNN RI dalam hal jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21.



*Kolaborasi BNN Provinsi Kalteng dengan Bea Cukai Palangka Raya dan JNE Palangkaraya dalam pengungkapan kasus dengan modus melalui jasa titipan*



*Kolaborasi BNN PROVINSI Kalteng dengan Avsec Bandara Cilik Riwut Palangka Raya dan PT. Pelindo Sampit dalam Pengungkapan Kasus dan Penangkapan DPO*

**10.****Sasaran : Meningkatkan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika**

Untuk mencapai sasaran diatas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE
12.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan Kesehatan tahanan	100	100	100%
13.	Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non- Narkotika	100	100	100%

**Indikator Kinerja : Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan Kesehatan tahanan**

#### 1. Definisi Operasional

Tingkat keamanan, ketertiban dan Kesehatan tahanan adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban dan Kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan, meliputi:

- a. Adanya tahanan yang kabur.
- b. Perkelahian antara tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan
- c. Hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

#### 2. Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan dengan mendata kejadian – kejadian seperti diatas. Penghitungan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Seluruh Tahanan} - (a + b + c)}{\text{Jumlah seluruh Tahanan}} \times 100\%$$

### 3. Hasil pengukuran

NO	Kasus	Jumlah Tahanan	Kesehatan	Nilai
1	Tahanan Masuk	22 tahanan	Sehat	100
2	Tahanan Keluar	14 tahanan (8 tahanan proses penyidikan)	Sehat	100
	Nilai	100	100	100

### 4. Perbandingan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir

Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir:

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2021	100	100	100%
2022	100	100	100%
2023	100	100	100%
2024	100	100	100%

Selama tahun 2022-2024 nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan selalu mencapai target yakni 100.

### 5. Permasalahan yang dihadapi

Kurangnya petugas penjaga tahanan dan penjagaan tahanan dibantu oleh penyidik BNN.

### 6. Faktor yang menunjang

Kesigapan petugas kesehatan dan petugas jaga tahanan sehingga tidak ada tahanan yang meninggal dunia di Rutan BNN Provinsi Kalimantan Tengah karena kelalaian petugas atau melarikan diri dari sel Rutan BNN Provinsi Kalimantan Tengah.

### 7. Sebagai Rekomendasi Perbaikan ke depan

Perlunya ditambah petugas penjaga tahanan di BNN Provinsi Kalimantan Tengah sehingga lebih mudah melakukan kontrol nilai tingkat keamanan.

### 8. Upaya yang Telah Dilakukan

Melakukan pengecekan kesehatan tahanan secara berkala.

## 9. Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target nasional

Target nasional nilai tingkat keamanan, ketertiban dan Kesehatan tahanan untuk tahun 2024 adalah 100 (Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024) sementara nilai tingkat keamanan, ketertiban dan Kesehatan tahanan untuk tahun 2024 oleh BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran pada tahun 2024 adalah 100. Sehingga BNN Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh BNN RI.



*Pemeriksaan Rutin Kesehatan Tahanan Rutan BNN Provinsi Kalimantan Tengah*

### **Indikator Kinerja : Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika**

#### 1. Definisi Operasional

Tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti narkotika dan non narkotika.

#### 2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan non narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahkan terimakan untuk tahap

penuntutan. Satuan pengukuran per – BA penitipan dan BA pengeluaran. Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum sama dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka di peroleh a = 1. Jika terdapat perbedaan dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka a = 0.

Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh data BA penitipan dan BA pengeluaran baik narkoba maupun non narkoba setiap LKN semuanya sama, maka diasumsikan a=1, sehingga capaian indikator kinerjanya 100%.

### 3. Hasil pengukuran

Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba sebesar 100 dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	Barang bukti	Barang bukti masuk	Barang bukti dimusnahkan & Untuk keperluan lain (Sesuai UU 35 Tahun 2009)
1	Shabu	1.216,57 gram	945,97 gram ( 270,60 gram belum dimusnahkan)
2	Ganja	848,79 gram	848,79 gram
3	Ekstasi	2 Butir	- ( 2 butir belum dimusnahkan)
	Nilai	100	100

### 4. Perbandingan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir

Berikut data barang bukti narkoba selama beberapa tahun terakhir:

TAHUN	JUMLAH BB NARKOTIKA			
	SHABU	EKSTASI	GANJA	TEMLAKAU SINTETIS
2022	2.074,44 Gram	10 Butir	-	3,87 Gram
2023	11.116,01 Gram	-	519,42 Gram	-
2024	1.216,57 Gram	2 Butir	848,79 Gram	-

Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir:

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2022	100	100	100%
2023	100	100	100%
2024	100	100	100%

Selama tahun 2022-2024 nilai Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika selalu mencapai target yakni 100.

5. Permasalahan yang dihadapi

Belum tersedianya ruang / tempat penyimpanan barang bukti yang memadai di BNN Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Faktor yang menunjang

Tidak ada barang bukti yang hilang dan semua barang bukti narkotika yang telah mendapat Surat Ketetapan dari Kejaksaan sudah dimusnahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Sebagai Rekomendasi Perbaikan ke depan

Agar dibuat ruang / tempat penyimpanan barang bukti dan perlu tambahan personil untuk mengisi posisi yang ada di seksi Wastahti.

8. Upaya yang Telah Dilakukan

Pengadaan CCTV di ruang barang bukti.

9. Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target nasional

Target nasional Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non- Narkotika untuk tahun 2024 adalah 100 (Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024) sementara Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non- Narkotika tahanan untuk tahun 2024 oleh BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran pada tahun 2024 adalah 100. Sehingga BNN Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh BNN RI.



Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu

**11. Sasaran : Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien**

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase
14.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Tengah	86	99,98	116,25
15.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	2	2	100

**Indikator Kinerja : Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Tengah.**

1. Definisi Operasional

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

2. Metode Pengukuran

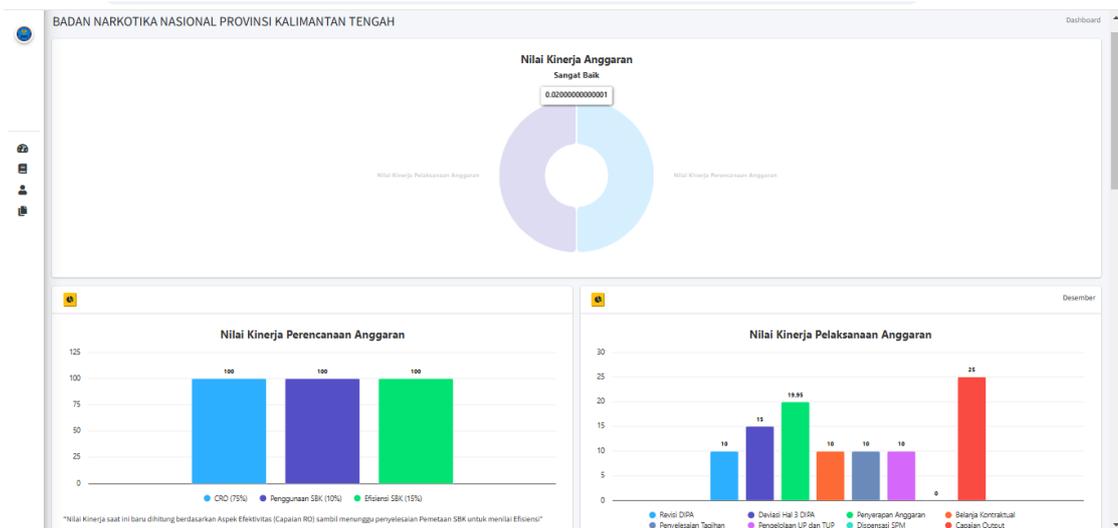
Nilai Kinerja Anggaran diambil dari aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Nilai tersebut ditentukan oleh beberapa aspek yakni Nilai Perencanaan Anggaran dan Nilai Pelaksanaan Penganggaran.

3. Hasil Pengukuran

**Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Tengah adalah 99,98 yang berarti telah mencapai target tahun 2024 sebesar 85.**

The screenshot shows a web interface for monitoring budget performance. The header includes the organization name 'BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH' and the user role 'Role'. The main title is 'Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja'. Below the title, there is a search bar and a 'Download Excel' button. A table displays the performance data for the unit 'BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH'. The table has columns for 'No.', 'Kode Satuan Kerja', 'Satuan Kerja', 'NK Perencanaan Anggaran', 'NK Pelaksanaan Anggaran', and 'Nilai Kinerja Anggaran'. The data row shows a target of 100,00 and a realization of 99,95, resulting in a performance value of 99,98. Navigation buttons 'Sebelumnya' and 'Selanjutnya' are visible at the bottom.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	642668	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	100,00	99,95	99,98



#### 4. Perbandingan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir

Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir:

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	88	99,23	112,76%
2021	99.5	86.49	86,92%
2022	88	87,63	99,57%
2023	88	85,41	97,05 %
2024	86	99,98	116,25%

Nilai Kinerja Anggaran dihitung dari Nilai Perencanaan Anggaran dan Nilai Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Beberapa kali terdapat perubahan cara pengukuran NKA, untuk tahun ini data penghitungan NKA ditarik langsung dari aplikasi SAKTI. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dihitung dari CRO, Penggunaan SBK, dan efisiensi SBK.

#### 5. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan dalam pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran adalah operator tidak dapat intervensi pada aplikasi SMART Kemenkeu dan belum ada formula pasti bagaimana cara meningkatkan efisiensi.

#### 6. Faktor yang menunjang

Pemahaman tentang kinerja anggaran bahwa pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan timeline dan pencapaian output sejalan dengan penyerapan anggaran.

#### 7. Rekomendasi perbaikan ke depan

- 1) Capaian output harus sejalan dengan penyerapan anggaran yang dilakukan.
- 2) Sosialisasi kepada bidang-bidang dan satker bahwa pencapaian output dan efisiensi penggunaan anggaran yang akan mampu meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran.

#### 8. Upaya yang Telah Dilakukan

Operator capaian output pada aplikasi SAKTI dan SMART Kemenkeu adalah orang yang sama sehingga progressnya dapat dipantau.

#### 9. Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target nasional

Target nasional Nilai Kinerja Anggaran BNN adalah 90 (Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024) sementara Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran adalah 99,98. Sehingga BNN Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh BNN RI.

### **Indikator Kinerja : Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target**

#### 1. Definisi Operasional

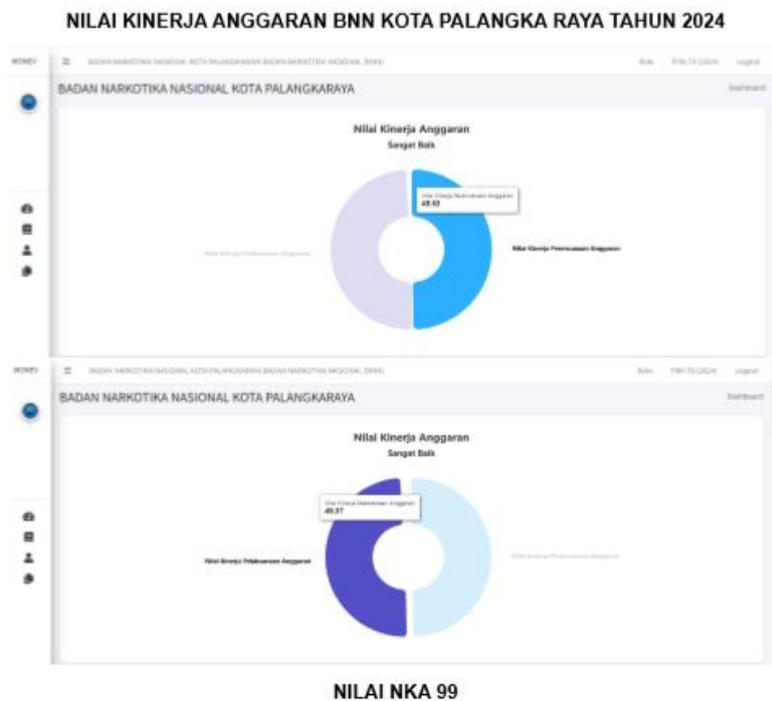
Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

#### 2. Metode Pengukuran

Nilai Kinerja Anggaran diambil dari aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Nilai tersebut ditentukan oleh beberapa aspek yakni Nilai Perencanaan Anggaran dan Nilai Pelaksanaan Penganggaran.

### 3. Hasil Pengukuran

Target indikator kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah berikutnya adalah Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebanyak 2 BNNK.



**NILAI NKA 99**

Role: Pilih TA (2024) Logout

#### Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	419256	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	100,00	99,90	99,95

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Download Excel

Setiap BNN Kabupaten/Kota memiliki target Nilai Kinerja Anggaran berbeda-beda sesuai dengan baseline tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 kedua BNN Kabupaten/Kota berhasil mencapai target NKA.

SATKER	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase
BNNK Palangka Raya	85	99	116,47%
BNNK Kotawaringin Barat	86	99,95	115,69

4. Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir:

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	-	-	-
2021	2 Kabupaten/ Kota	0 Kabupaten/ Kota	0 %
2022	2 Kabupaten/ Kota	0 Kabupaten/ Kota	0 %
2023	2 Kabupaten/ Kota	1 Kabupaten/ Kota	50 %
2024	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	100 %

Pada tahun 2020, Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran belum menjadi indikator kinerja sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023 tercapai target hanya 1 BNNK yakni BNN Kota Palangka Raya. Di tahun 2024, kedua BNNK berhasil mencapai target NKA.

5. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan dalam pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran adalah operator tidak dapat intervensi pada aplikasi SMART Kemenkeu dan belum ada formula pasti bagaimana cara meningkatkan efisiensi.

6. Faktor yang menunjang

Pemahaman tentang kinerja anggaran bahwa pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan timeline dan pencapaian output sejalan dengan penyerapan anggaran.

7. Rekomendasi perbaikan ke depan

1) Capaian output harus sejalan dengan penyerapan anggaran yang dilakukan.

- 2) Sosialisasi kepada bidang-bidang dan satker bahwa pencapaian output dan efisiensi penggunaan anggaran yang akan mampu meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran.

8. Upaya yang Telah Dilakukan

Operator capaian output pada aplikasi SAKTI dan SMART Kemenkeu adalah orang yang sama sehingga progressnya dapat dipantau.

9. Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target nasional

Target nasional Nilai Kinerja Anggaran BNN adalah 90 (Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024) sementara Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 BNN Kota Palangka Raya dan BNN Kotawaringin Barat melebihi target NKA BNN 90. Sehingga BNNP Kalimantan Tengah dan seluruh jajarannya berhasil melampaui target nasional BNN RI.

**12.**

**Sasaran : Meningkatkan tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur**

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase
16.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Tengah	97,96	99,95	102,03%
17.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2	1	50%

**Indikator Kinerja : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Tengah**

1. Definisi Operasional

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga.

## 2. Metode Pengukuran

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Akuntansi Negara (OMSPAN) Kementerian Keuangan. IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

## 3. Hasil Pengukuran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	043	006	882858	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	100.00	99.77	100.00	100.00	100.00	100.00	99.95	100%	0.00	99.95
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.95	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.94				100.00				

Nilai IKPA BNN Provinsi Kalimantan Tengah 99,95 sehingga melampaui targetnya yang 97,96.

## 4. Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir:

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	-	-	-
2021	94	98,26	104,53
2022	95	98,17	103,33
2023	92	97,86	106,36
2024	97,96	99,95	102,03

Pada tahun 2020, nilai IKPA belum menjadi indikator kinerja sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021,2022 dan 2023. Selama 2021 dan 2022 target nilai IKPA tercapai namun terjadi penurunan capaian sebesar 1,2%.Pada

tahun 2023 target IKPA diturunkan menjadi 92, dan target tercapai walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2024, target yang diberikan adalah 97,96. BNN Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mencapai target 99,95.

#### 5. Permasalahan yang dihadapi

Penyebab Nilai IKPA BNN Provinsi Kalimantan Tengah tidak maksimal adalah penyerapan hanya 99,77%. Indikator tidak mencapai nilai maksimal karena terdapat sisa anggaran yang tidak bisa diserap di gaji pegawai.

#### 6. Faktor yang menunjang

- 1) Pemahaman PPK dan pelaksana keuangan terhadap indikator yang tidak maksimal di tahun sebelumnya yakni deviasi halaman III DIPA, setiap bulan PPK memastikan agar penyerapan sejalan dengan rencana penarikan dana yang telah dibuat.

#### 7. Rekomendasi perbaikan ke depan

- 1) PPK dan pelaksana bidang melaksanakan pembelanjaan sesuai rencana penarikan dan mengawasi agar penyerapan anggaran memperhatikan aturan yang berlaku secara efisien dan efektif.
- 2) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja keuangan satker binaan sehingga dapat diantisipasi segera jika nilai indikator kinerja berpotensi tidak maksimal.

#### 8. Upaya yang Telah Dilakukan

- a. Pemahaman PPK dan pelaksana keuangan terhadap indikator yang tidak maksimal di tahun sebelumnya yakni deviasi halaman III DIPA.
- b. Setiap bulan PPK memastikan agar penyerapan sejalan dengan rencana penarikan dana yang telah dibuat.
- b. Meningkatkan sinergi antar pejabat pengelola perbendaharaan, sehingga ada kesamaan pandangan dan mempunyai keinginan untuk meningkatkan nilai IKPA.
- c. Menjalankan fungsi pengawasan sebaik mungkin baik yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran.

- d. Melakukan revisi pada RPD sesuai jadwal yang ditentukan dengan memperhatikan update timeline kegiatan yang telah dan belum dilaksanakan.
- e. Bendahara melakukan penagihan pertanggungjawab keuangan sehingga pengelolaan TUP lancar.

**Indikator Kinerja : Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target**

**1. Definisi Operasional**

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Target nilai IKPA untuk BNNK adalah 96,41 dan 99,19.

**2. Metode Pengukuran**

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Akuntansi Negara (OMSPAN) Kementerian Keuangan. IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

**3. Hasil Pengukuran**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALANGKARAYA

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN**

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	043	000	145101	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALANGKARAYA	Nilai	100.00	93.92	100.00	100.00	100.00	98.32	99.30	98.74	100%	0.00	98.74
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	14.09	20.00	10.00	10.00	9.83	24.83				
					Nilai Aspek	99.99		99.58			99.30					

IKPA BNNK Kota Palangka Raya



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	102	066	419256	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	99.20	100.00	79.92	80%	0.00	99.90
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	100.00			99.60		100.00					

IKPA BNNK Kotawaringin Barat

NO	SATKER	TARGET	CAPAIAN
1	BNN Kota Palangka Raya	99,19	98,74
2	BNN Kab. Kotawaringin Barat	96,41	99,90

Adapun Nilai IKPA BNNK Palangka Raya adalah 98,74 dan nilai IKPA BNNK Kotawaringin Barat adalah 99,90. Hanya BNNK Kotawaringin Barat yang mencapai target, sedangkan BNNK Palangka Raya tidak.

4. Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir:

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	-	-	-
2021	2 Kabupaten/ Kota	0 Kabupaten/ Kota	0 %
2022	2 Kabupaten/ Kota	0 Kabupaten/ Kota	0 %
2023	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	100 %
2024	2 Kabupaten/ Kota	1 Kabupaten/ Kota	50%

Target BNN Kota Palangka Raya tidak mencapai target sehingga target BNN Provinsi Kalimantan Tengah untuk indikator Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target hanya 1.

5. Permasalahan yang dihadapi

1) Terdapat beberapa indikator pelaksanaan anggaran pada BNNK Palangka Raya yang tidak mencapai nilai maksimal yakni :

- a. Deviasi halaman III DIPA
  - b. Pengelolaan UP dan TUP
  - c. Capaian Output
5. Faktor yang menunjang
- 1) Pemahaman PPK dan pelaksana keuangan di BNNK terhadap indikator yang mempengaruhi nilai IKPA.
  - 2) Monitoring dan evaluasi Pembina Fungsional terhadap kinerja keuangan setiap BNNK sehingga dapat diantisipasi segera jika nilai indikator kinerja berpotensi tidak maksimal.
6. Rekomendasi perbaikan ke depan
- 1) PPK dan pelaksana bidang melaksanakan pembelanjaan sesuai rencana penarikan dan mengawasi agar penyerapan anggaran memperhatikan aturan yang berlaku secara efisien dan efektif.
  - 2) Meningkatkan sinergi antar pejabat pengelola perbendaharaan, sehingga ada kesamaan pandangan dan mempunyai keinginan untuk meningkatkan nilai IKPA satuan kerja yang bersangkutan.
  - 3) Menjalankan fungsi pengawasan sebaik mungkin baik yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran.
8. Upaya yang Telah Dilakukan
- a. Melakukan pembinaan kepada satker BNNK terkait IKPA dan NKA;
  - b. Menjalankan fungsi pengawasan sebaik mungkin baik yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran.

**13.**

**Sasaran : Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal**

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase
18.	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	85	85	100%

**Indikator Kinerja : Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal**

1. Definisi Operasional

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator dari komponen ini antara lain adanya kebijakan standar pelayanan, implementasi budaya pelayanan prima serta melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan melakukan tindak lanjut atas hasil survei tersebut. Terdapat 6 komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan. Nilai Zona Integritas adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur enam komponen tersebut yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas yang dinilai secara internal oleh Inspektorat melalui Tim Penilaian Internal.

2. Metode Pengukuran

Nilai Zona Integritas adalah hasil penilaian internal BNN (Inspektorat) terhadap Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI) dan data dukung yang diisi dan dikumpulkan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas BNN Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024.

### 3. Hasil Pengukuran

BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
SURAT Inspektur Utama BNN  
NOMOR : B/658/XII/IR/IR.04.05/2024/INS  
TANGGAL : 30 Desember 2024

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
NILAI ZONA INTEGRITAS BERDASARKAN  
PENILAIAN INTERNAL PADA BNNP TAHUN 2024**

No.	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI		
		Pengungkit	Hasil	Jumlah
1	BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta	55.51	36.43	91.94
2	BNNP Jawa Timur	53.21	34.98	88.19
3	BNNP Nusa Tenggara Barat	51.47	36.59	88.06
4	BNNP Sumatera Selatan	51.24	36.26	87.50
5	BNNP Sulawesi Selatan	49.82	36.90	86.72
6	BNNP Jawa Tengah	51.31	34.97	86.28
7	BNNP Bali	49.75	36.52	86.27
8	BNNP Kalimantan Selatan	50.66	34.86	85.52
9	BNNP Kalimantan Tengah	49.97	35.03	85.00
10	BNNP Lampung	50.42	34.53	84.95
11	BNNP Sumatera Barat	51.49	31.83	83.32

Hasil penilaian inspektorat berdasarkan Surat Inspektur Utama BNN Nomor B/658/XII/IR/IR.04.05/2024/INS tanggal 30 Desember 2024 tentang Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Nilai Zona Integritas Berdasarkan Penilaian Internal Pada BNNP Tahun 2024, nilai Zona Integritas BNN Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 adalah 85 sehingga target tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja tercapai.

4. Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir:

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2023	75	83,56	111,41 %
2024	85	85	100 %

Pada tahun 2020-2022, Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal oleh Inspektorat belum menjadi indikator kinerja sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

5. Permasalahan yang dihadapi

- 1) Pembangunan zona integritas belum menghasilkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja.
- 2) Pemahaman pegawai mengenai Zona Integritas masih perlu ditingkatkan.
- 3) Inovasi yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan belum memberikan dampak optimal, belum terdapat perubahan berarti.

6. Faktor yang menunjang

- 1) Keterlibatan pimpinan dalam pembangunan Zona Integritas.
- 2) Perencanaan kinerja dan anggaran telah terpetakan dengan baik.

7. Rekomendasi perbaikan ke depan

- 1) Dokumen pendukung dipersiapkan dengan baik.
- 2) Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan terus-menerus sebagai peningkatan pengelolaan reformasi birokrasi.

8. Upaya yang Telah Dilakukan

- 1) Melakukan sosialisasi pembangunan zona integritas kepada seluruh pegawai di lingkungan BNN Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2) Menempatkan pegawai yang menangani Pokja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

9. Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target nasional

Target BNN RI untuk jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75 adalah sebanyak 6 satker (Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024) sementara Nilai Zona Integritas BNN Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 adalah 85. Hasil penilaian Tim Penilaian Internal terdapat 25 satker yang mendapatkan nilai lebih dari 75. BNN Provinsi Kalimantan Tengah masuk 10 besar nilai tertinggi dan berada di peringkat ke-9.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
SUBAT Inspektur Utama BNN  
NOMOR : B/558/XI/IB/04.05/2024/INS  
TANGGAL : 30 Desember 2024

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
NILAI ZONA INTEGRITAS BERDASARKAN  
PENILAIAN INTERNAL PADA BNNP TAHUN 2024**

No.	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI		
		Pengungkit	Hasil	Jumlah
1	BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta	55.51	36.43	91.94
2	BNNP Jawa Timur	53.21	34.98	88.19
3	BNNP Nusa Tenggara Barat	51.47	36.59	88.06
4	BNNP Sumatera Selatan	51.24	36.26	87.50
5	BNNP Sulawesi Selatan	49.82	36.90	86.72
6	BNNP Jawa Tengah	51.31	34.97	86.28
7	BNNP Bali	49.75	36.52	86.27
8	BNNP Kalimantan Selatan	50.66	34.86	85.52
9	BNNP Kalimantan Tengah	49.97	35.03	85.00
10	BNNP Lampung	50.42	34.53	84.95

## **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Realisasi anggaran belanja BNN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebesar Rp.7.675.626.440,- (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan blokir sebesar Rp.16.524.000,- atau 96,09% dari total anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp.7.988.525.000,- (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

**DAFTAR TARGET/REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PER 31 DESEMBER 2024**

NO	KODE	INDIKATOR OUTPUT	ANGGARAN				OUTPUT			
			Pagu Awal	Blokir	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Satuan
1	3236.EBA.994	Layanan Perkantoran	4,281,671,000		4,001,008,445	93.45	12	12	100.00	Layanan
2	3236.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	456,000		456,000	100.00	1	1	100.00	Dokumen
3	3237.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	24,950,000		24,100,000	96.59	1	1	100.00	Layanan
4	3238.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5,280,000		5,246,175	99.36	2	2	100.00	Dokumen
5	3238.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	8,235,000		8,235,000	100.00	2	2	100.00	Dokumen
6	3239.EBA.962	Layanan Umum	297,938,000		297,636,694	99.90	1	1	100.00	Layanan
7	3239.EBA.994	Layanan Perkantoran	1,790,989,000		1,789,418,240	99.91	12	12	100.00	Layanan
8	3979.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	20,000,000		20,000,000	100.00	1	1	100.00	Layanan
9	3247.QDE.002	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	40,000,000		40,000,000	100.00	5	5	100.00	Keluarga

10	3247.UBB.001	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa	76,000,000		76,000,000	100.00	2	2	100.00	Desa
11	3248.BDD.001	Fasilitasi Program Alternatif Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	70,160,000		70,062,000	99.86	1	1	100.00	Kelompok Masyarakat
12	3251.BKA.002	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	100,000,000		99,992,864	99.99	2	2	100.00	Laporan
13	3256.BAA.001	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	23,660,000		23,660,000	100.00	20	20	100.00	Orang
14	3257.QDB.001	Advokasi Kebijakan Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	211,832,000	3,290,000	205,553,420	97.04	2	2	100.00	Lembaga
15	3258.BAA.002	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)	39,825,000	384,000	35,430,000	88.96	15	15	100.00	Orang

16	3258.BIA.002	Layanan Pengawasan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika (Unit Vertikal)	22,200,000		22,200,000	100.00	2	2	100.00	Produk
17	3258.BIB.002	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU	64,860,000		64,724,000	99.79	10	10	100.00	Orang
18	3259.PDG.001	Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	25,620,000		25,620,000	100.00	10	10	100.00	Orang
19	3260.BAA.002	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	99,800,000		99,769,538	99.97	55	55	100.00	Orang
20	3260.BAA.003	Layanan SKHPN	127,600,000		127,600,000	100.00	550	550	100.00	Orang
21	3260.BDB.001	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	74,153,000	7,600,000	66,553,000	89.75	11	11	100.00	Lembaga
22	3260.QDB.001	Unit IBM yang Operasional	89,732,000	5,250,000	80,181,800	89.36	2	2	100.00	Lembaga
23	5354.BCA.002	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	346,244,000		345,786,985	99.87	7	7	100.00	Perkara
24	5936.QDB.001	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan Soft Skill	147,320,000		147,320,000	100.00	2	2	100.00	Lembaga
		<b>JUMLAH</b>	<b>7,988,525,000</b>	<b>16,524,000</b>	<b>7,676,554,161</b>	<b>96.095</b>				

Walaupun realisasi tidak mencapai 100% untuk setiap ROnya namun BNN Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mencapai keseluruhan target output dia tahun 2024. Berikut rekapitulasi anggaran dan realisasi (blokir dimasukkan dalam realisasi):

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa	Persentase
1	Belanja Pegawai	Rp.4.218.311.000,-	Rp.3.770.214.000,-	Rp.281.590.276,-	93,32%
2	Belanja Barang	Rp.3.642.614.000,-	Rp.3.738.905.716,-	Rp.31.308.284,-	99,14%
3	Belanja Modal	-	-	-	-
	Jumlah	Rp. 7.988.525.000,-	Rp.7.675.626.440,-	Rp.312.898.560,-	96,08%

Perbandingan anggaran pada tahun 2022-2024:

No	Jenis Belanja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Belanja Pegawai	Rp.3.463.814.000,-	Rp.3.652.592.000,-	Rp.4.218.311.000,-
2	Belanja Barang	Rp.4.203.527.000,-	Rp.4.046.136.000,-	Rp.3.642.614.000,-
3	Belanja Modal	Rp. 14.000.000,-	Rp. 48.550.000,-	-
	Jumlah	Rp.7.681.314.000,-	Rp.7.747.278.000,-	Rp. 7.988.525.000,-

Untuk realisasi BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran TA.2024 adalah sebagai berikut :

No	Satker	Pagu	Realisasi	Persentase
1	BNN Provinsi Kalimantan Tengah	Rp. 7.988.525.000,-	Rp.7.675.626.440,-	96,08%
2	BNNK Palangka Raya	Rp.1.746.607.000,-	Rp.1.728.106.059,-	98,94%
3	BNNK Kotawaringin Barat	Rp.1.611.961.000,-	Rp. 1.607.121.464,-	99,70%
		<b>Rp.11.347.093.000,-</b>	<b>Rp.11.010.853.963,-</b>	<b>97,03%</b>

## BAB IV PENUTUP

### A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024 rata – rata sebesar 107,34% masuk dalam kategori memuaskan, rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Kategori
1	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	100	Memuaskan
2	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	100	Memuaskan
3	2 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota	100	Memuaskan
4	1 Kawasan	1 Kawasan	100	Memuaskan
5	2,5 Indeks	2,89 Indeks	115,6	Memuaskan
6	68%	79,5%	116,91	Memuaskan
7	10 Orang	10 Orang	100	Memuaskan
8	1 Lembaga	1 Lembaga	100	Memuaskan
9	6 Unit	6 unit	100	Memuaskan
10	3,60 Indeks	3,70 Indeks	102,77	Memuaskan
11	7 Berkas Perkara	16 Berkas Berkara	228,57	Memuaskan
12	100	100	100	Memuaskan
13	100	100	100	Memuaskan
14	86 Indeks	99,98	116,25	Memuaskan
15	2 BNNK	2 BNNK	100	Sangat Baik
16	97,96 Indeks	99,95	102,03	Memuaskan
17	2 BNNK	1 BNNK	50	Sangat Baik
18	85 Indeks	85 Indeks	100	Memuaskan

Rentang Capaian	Kategori
Capaian $\geq$ 100%	Memuaskan
$85\% \leq$ Capaian $<$ 100%	Sangat Baik
$70\% \leq$ Capaian $<$ 85%	Baik
$55\% \leq$ Capaian $<$ 70%	Cukup
$55\% \leq$ Capaian	Kurang

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran belanja BNN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebesar Rp.7.675.626.440,- (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau 96,08% dari total anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp.7.988.525.000,- (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa	Persentase
1	Belanja Pegawai	Rp.4.218.311.000,-	Rp.3.770.214.000,-	Rp.281.590.276,-	93,32%
2	Belanja Barang	Rp.3.642.614.000,-	Rp.3.738.905.716,-	Rp.31.308.284,-	99,14%
3	Belanja Modal	-	-	-	-
	Jumlah	Rp. 7.988.525.000,-	Rp.7.675.626.440,-	Rp.312.898.560,-	96,08%

## C. Rekomendasi/Rencana Aksi Kedepan

1. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/sosial, media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.
2. Perlu meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta untuk mendukung program P4GN.
3. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat, upaya yang dilakukan dengan menambah target wilayah pemberdayaan masyarakat yang

menjadi sasaran kinerja sesuai dengan prioritas, program/kegiatan, hasil dan anggaran yang tersedia. Kemudian memberikan apresiasi dan pembinaan keberlanjutan kepada penggiat anti narkoba.

4. Optimalisasi pemanfaatan IT yang ada dan mengupgrate peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan kerjasama dengan para penegak hukum termasuk sharing informasi.
5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dari tingkat perencanaan hingga pelaporan dan melakukan perbaikan sesegera mungkin.

**Palangka Raya, Januari 2025**

**Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah,**



**Dr. Joko Setiono, SH., SIK., M.Hum.**